

**PERAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MUTU
SARANA PENDIDIKAN**

(Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi)

TESIS



Disusun oleh:

BUSTANUL ARIFIN

NIM: 212214012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

MARET 2017

ABSTRAK

Arifin, Bustanul. 2016. Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi). Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam memajukan kualitas pendidikan serta keinginan masyarakat yang tinggi dibutuhkan sarana prasarana sebagai salah satu pendukungnya dan adanya dukungan dari masyarakat dalam memajukan pendidikan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan dan mampu menjawab serta mengantisipasi berbagai tantangan masa depan. Kesadaran peran masyarakat dalam memajukan kualitas pendidikan di madrasah ibtidaiyah perlu mendapatkan perhatian karena peran masyarakat merupakan bagian dari pengaruh kualitas pendidikan yang ada di madrasah.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang peran masyarakat dalam wadah komite dalam meningkatkan mutu pendidikan dan, 2) mendeskripsikan gambaran tentang peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah: 1) peran masyarakat dalam wadah komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pengambil keputusan, masyarakat diajak musyawarah dalam kegiatan-kegiatan madrasah, sebagai pelaksana, masyarakat bergotong-royong membantu membangun sarana prasarana gedung ruang kelas sesuai dengan kesepakatan awal sebelum pelaksanaan pengerjaan, peran sebagai pengambil manfaat, peningkatan jumlah kelulusan dan adanya peningkatan jumlah prosentasi program yang terlaksana, peran sebagai evaluasi, tahap evaluasi yang dilakukan atas keseluruhan program yang dilakukan dan 2) peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pendukung, adanya bantuan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan, sebagai mediator, masyarakat memberikan pengawasan kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD kabupaten tentang pencairan dana yang akan diberikan madrasah, Sebagai pertimbangan, adanya musyawarah dalam membentuk paguyuban wali murid, Sebagai pengontrol, pemberian pengawasan dan evaluasi atas program yang telah dilakukan seperti dalam rapat atau saat pelaksanaan program madrasah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk memperbaiki nasib serta peradaban umat manusia.¹ Keberadaan peran masyarakat kepada lembaga dalam memajukan lembaga menjadi poin utama dalam memperbaiki kualitas lembaga.

Saat ini dukungan dan peranan orang tua dalam partisipasi peningkatan mutu sekolah mulai melemah seiring dengan kemajuan dan berkembangnya zaman di era globalisasi. Oleh sebab itu pemerintah dengan segala aktivitas dan upayanya membuat wadah sebuah komite sekolah dengan harapan bisa ikut serta berpartisipasi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sebuah lembaga.

Menurut Wawan Kuswan, ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusat pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan

¹ Hajair Sanaly, Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 211.

kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggaraan sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya sebatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.²

Maju mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Sehingga bukan hanya kepala sekolah dan dewan guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi masyarakat setempat terlihat pula memikirkannya. Untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan cara memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, maupun program yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.³

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, maka tanggung jawab pemerintah daerah akan lebih

² Wawan Kuswan, *School Based Managemen :Format Madrasah Masa Depan dan Masa Depan Madrasah* (Bandung: Media Pembinaan, 2003), 15.

³ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 83.

meningkat termasuk dalam bidang manajemen pendidikan.⁴ Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi tersebut menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah di bidang pendidikan. Karena sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Hal ini merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang merupakan pra syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan dimana pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Meningkatnya mutu pendidikan bukan hanya ditentukan dan dipengaruhi oleh tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, tetapi juga ditentukan dan dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan itu sendiri dalam hal ini masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang partisipasinya bagi pendidikan sungguh sangat diharapkan karena tanpa adanya kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka mustahil tujuan yang diinginkan bersama dapat berjalan dengan baik dan lancar.⁵

Pembangunan yang dilakukan oleh negara termasuk salah satu wujud dari implementasi kebijaksanaan yang diformulasikan. Bentuk pembangunan tersebut tidak hanya masalah fisik dan mental, melainkan juga sekaligus pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, dengan demikian termasuk bagian atau obyek dari pembangunan itu sendiri.

⁴ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁵ Edwar Sallis, Total Quality Managemen In Education (Jogjakarta: IRCiSode, 2008), 38.

Masyarakat juga dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan, tidak saja sekadar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahnya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikan.⁶

Lemahnya pola manajemen pendidikan mendorong pemerintah menerapkan pola baru manajemen pendidikan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis, sejalan dengan tuntutan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Tuntutan tersebut tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, UU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, butir-butir ketentuan yang penting dalam Kemendiknas tersebut akhirnya juga diakomodasi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁷

⁶Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 79-80.

⁷Peraturan Pemerintah UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.

Paradigma pembangunan pendidikan dengan menggunakan pendekatan partisipatif sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Akan tetapi realitas sampai sekarang ini ternyata banyak program pembangunan di bidang pendidikan dengan melibatkan masyarakat masih dilakukan dengan cara-cara lama yang sudah ada. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah dan masyarakat masih miskin pengalaman dalam tataran konsep maupun implementasi pendekatan partisipatif.⁸

Kegiatan proses belajar mengajar merupakan aspek penting dalam menentukan peningkatan mutu pendidikan. Sementara faktor lain yang diperlukan untuk mendukung dan mempengaruhi seperti kelengkapan sarana prasarana, keterlibatan peran orang tua dan masyarakat.⁹

Penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, mutlak memerlukan landasan epistemologis dan kerangka teori yang memberikan pengakuan terhadap kapabilitas masyarakat sebagai aktor dan pelaku (agent) yang memiliki kemampuan dan kemandirian. Hanya dengan demikian, maka aspirasi dari masyarakat yang menjadi pengurus/anggota Komite Sekolah dapat dipahami secara lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah, tampaknya telah diteliti di Indonesia. Diantaranya penelitian Ade Faizatul Mutmainah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat (orang tua) dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan hasil yang sangat tinggi dengan jumlah persentasi 78%. Hal ini terbukti adanya empat indikator yang berkategori

⁸ Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 4.

⁹ Suparlan, Membangun Sekolah Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008), 107.

sangat tinggi yaitu keberhasilan MBS, bentuk partisipasi masyarakat, sumber partisipasi masyarakat, mekanisme partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. Sedangkan indikator yang berkategori tinggi adalah peranan komite sekolah yang meliputi orang tua yang dilibatkan dalam semua kegiatan yang dilakukan dalam komite sekolah, orang tua bersama komite sekolah mengadakan kerja sama dengan instansi lain dan komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan program sekolah¹⁰

Orang tua pada umumnya tidak mempunyai alasan untuk terlibat aktif di sekolah, khususnya sebagai anggota Komite Sekolah. Kepedulian akan berhasil jika ada keinginan yang kuat dari dalam diri untuk benar-benar terlibat dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Persoalan yang terjadi adalah masih banyaknya orang tua yang belum melibatkan diri dalam peningkatan mutu pendidikan¹¹

Keberadaan Komite Sekolah memberikan peran strategis terutama dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat kepada sekolah atau pemerintah. Keberadaan komite sekolah juga menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan mengakomodasikan serta memformulasikan ke dalam program-program sekolah dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat.

Madrasah merupakan lembaga Islam yang berbasis masyarakat.

Mulyanto Sumardi menyatakan bahwa, madrasah merupakan bentuk dari

¹⁰ Ade Faizatul Mutmainnah, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

¹¹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Aspirasi Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 242.

community base education (pendidikan berbasis masyarakat). Hal tersebut tidaklah berlebihan karena hampir semua jenjang pendidikan madrasah yang berstatus swasta. Dengan status yang sebagian besar swasta maka keberlangsungan madrasah itu sangat tergantung pada masyarakat.¹²

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Ngrayudan Jogorogo Ngawi, bentuk-bentuk peran masyarakat dalam hal sarana prasarana seperti pembangunan gedung ruang belajar, pembangunan masjid sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan belum bisa berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari sebagian kondisi sarana prasarana di MIN Ngrayudan belum sesuai standar. Kondisi sarana prasarana ruang kelas di lembaga MIN Ngrayudan masih kurang layak dan belum memenuhi standar untuk proses pembelajaran, karena sebagian ruang belajar di MIN Ngrayudan masih dibuat berupa batas-batas yang terbuat dari bambu untuk memenuhi ruang belajar sementara¹³

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi, lembaga tidak hanya mengandalkan usaha dari dalam lembaga seperti pendidik, tenaga pendidik, karyawan, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada di lembaga tersebut akan tetapi lembaga juga berupaya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk partisipasi yang sudah dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mutu sarana prasana pembangunan ruang belajar meliputi; kerja bakti gotong royong dari masyarakat dalam pembangunan gedung ruang belajar,

¹² Umberto Sihombing, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2002), 56.

¹³ Nasrun, Wawancara, Ngawi, 23 Februari 2016.

sumbangan masyarakat berupa bambu untuk keperluan ruang belajar sementara, masyarakat memberikan usulan dan masukan untuk rencana pembangunan gedung ruang belajar, dan rencana untuk pengadaan pembelian tanah untuk perluasan ruang kelas masyarakat berinfak dan dibantu dari para guru yang mendapatkan sertifikasi¹⁴ Dampak yang dihadapi jika sarana ruang gedung belum memenuhi standar mengakibatkan suasana pembelajaran tidak kondusif, penjelasan mata pelajaran/materi kepada siswa terganggu, kondisi siswa merasa dibedakan dengan siswa lainnya¹⁵ Dari paparan tersebut menjadikan alasan peneliti memilih MIN sebagai lokasi penelitian karena dengan dukungan masyarakat kurang menjadikan dampak kualitas pendidikan belum baik hingga akhirnya kemudian atas gerakan stakeholder madrasah dalam mendorong masyarakat dapat menghasilkan hasil yang baik.

Berdasarkan fakta di atas melihat pentingnya peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, maka peneliti tertarik untuk menggali dan menelusuri secara mendalam melalui penelitian yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi).

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada masalah peran masyarakat sebagai komite sekolah dan peran masyarakat sebagai dewan pendidikan dalam

¹⁴ Ibid., 27 April 2016.

¹⁵ Ibid, 30 Juni 2016

meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam wadah komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam wadah komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi
2. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu yang ada dan digunakan serta dikembangkan tentang bentuk-bentuk peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di madrasah ibtidaiyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga

Sumbangan atau kontribusi pemikiran tentang peningkatan mutu pendidikan melalui peran masyarakat di MIN Ngrayudan Jogorogo, Ngawi.

b. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan terkait strategi peningkatan mutu pendidikan melalui peran masyarakat yang dihasilkan dari proses penelitian di MIN Ngrayudan Jogorogo, Ngawi.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini ditulis dalam enam bab, dan masing-masing bab dibahas ke dalam subbab, berikut susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian teori yang terdiri dari:

- a. Peran masyarakat meliputi: peran masyarakat dalam wadah komite, dan peran masyarakat dalam wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan

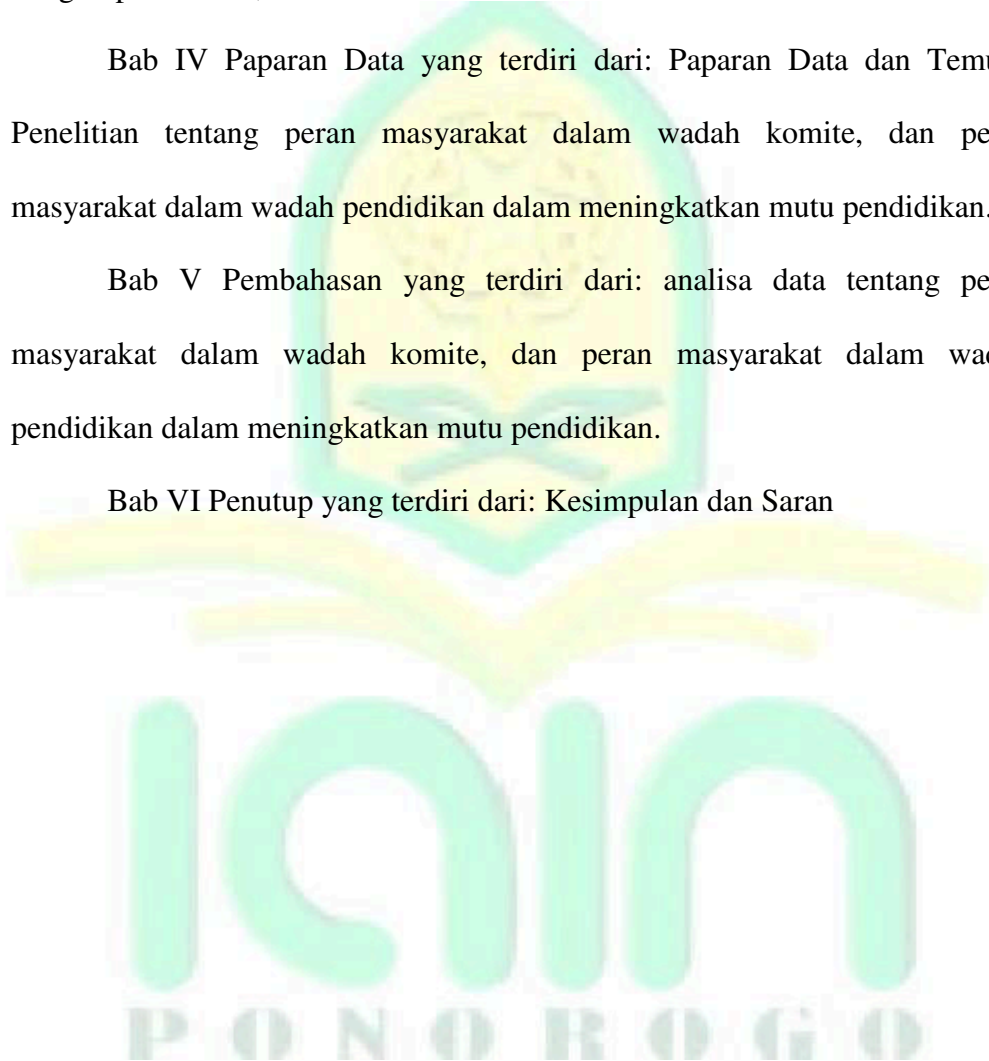
- b. Mutu pendidikan meliputi: konsep mutu, pengaruh mutu, dan indikator pendidikan yang bermutu

BAB III Teknik Penelitian yang terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Tehnik Keabsahan Data.

Bab IV Paparan Data yang terdiri dari: Paparan Data dan Temuan Penelitian tentang peran masyarakat dalam wadah komite, dan peran masyarakat dalam wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bab V Pembahasan yang terdiri dari: analisa data tentang peran masyarakat dalam wadah komite, dan peran masyarakat dalam wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bab VI Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran



BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Dari penelusuran tentang kajian terdahulu dalam sebuah penelitian, peneliti menemukan tiga judul penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian tentang peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu:

1. Penelitian atas nama Mutohirin. 2008 dengan judul penelitian Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Ibtidaiyah Mathlabul Ulum Dukuh Tengah Ketanggungan Brebes.¹⁶ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mutohirin adalah:

Pertama, usaha yang dilakukan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu PAI adalah menyekolahkan anak-anak ke TPA dan Madrasah Diniyah, menjadi ustadz dan ustadzah di TPA dan Madrasah Diniyah, mendorong anak-anaknya mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di MIMU, menjadi pelatih atau pembimbing kegiatan ekstra kurikuler seni baca al-Qur'an, ikut serta mensukseskan kegiatan PHBI di MIMU, ikut serta mensukseskan proses pembelajaran secara umum, menyampaikan keluhan kesahnya (kritik dan saran) mengenai tingkah laku, prestasi siswa kepada MIMU.

¹⁶ Penelitian Tesis oleh Mutohirin, Partisipasi Masyarakat Dalam Kualitas Pendidikan Agama Islam (Semarang: Tesis, 2008.)

Kedua, walaupun usahanya belum maksimal tapi sudah menunjukkan yang dapat dibanggakan, yaitu mutu pendidikan PAI di MIMU sudah mulai membaik dan ada peningkatan. Hal ini ditandai dengan semakin lancarnya proses belajar mengajar PAI, tingkah laku siswa/siswi hingga nilai rata-rata PAI meningkat dengan banyaknya siswa yang masuk ke madrasah diniyah dan giat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan aktivitas keagamaan masyarakat meningkat.

Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berperan meningkatkan Mutu PAI dibagi menjadi 2 kelompok yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internalnya terletak dalam hal teknik dan administrasi serta dalam diri pribadi masing-masing individu masyarakat. Hambatan dalam hal teknik dan administrasi meliputi kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya dana karena kurangnya inisiatif dalam penggalan dana dari masyarakat, struktur kepengurusan dan keanggotaan yang tergabung dalam komite sekolah kurang berfungsi dan komunikasi yang kurang efektif antara masyarakat dengan MIMU. Disamping itu hambatan dalam diri pribadi yaitu meliputi tingkat pengetahuan yang masih rendah, tingkat perekonomian yang rendah (rata-rata menengah ke bawah). Dibalik semua itu masyarakat telah sadar akan pentingnya pendidikan sehingga dengan rendah hati memberikan perannya terhadap MIMU baik berupa fisik maupun non fisik. Diantaranya dalam proses pembelajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pendanaan atau pembiayaan.

2. Penelitian atas nama Suratman. 2006 dengan judul penelitian Peran Masyarakat Pesisir Dan Upaya Sekolah Dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 38 Purworejo.¹⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suratman adalah: Pertama masyarakat pesisir selatan Purworejo memberikan makna terhadap mutu sekolah hanya dari segi output saja. Kedua peran masyarakat pesisir terhadap sekolah masih sangat rendah, karena baru dalam taraf dukungan dana. Ketiga upaya peningkatan peran masyarakat dilakukan dengan melibatkan pengurus komite sekolah dalam pembuatan kebijakan sekolah. Keempat upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah, dengan mempertimbangkan peningkatan mutu akademik maupun non akademik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat.
3. Selanjutnya penelitian atas nama Amir Daud dengan judul penelitian Peran Masyarakat dalam Pengendalian Mutu Pendidikan. 2010.¹⁸ Hasil penelitian yang dilakukan adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa khusus untuk aspek peran serta masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan menunjukkan hasil: (1) pemahaman masyarakat tentang pendanaan pendidikan masih kurang; (2) kesadaran dan atau keterlibatan masyarakat/orang tua pada proses penyelenggaraan pendidikan masih

¹⁷ Penelitian Tesis oleh Suratman, Partisipasi Masyarakat Pesisir dan Upaya Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 38 Purworejo (Surakarta, Tesis, 2006).

¹⁸ Penelitian Tesis oleh Amir Daud, Peran Masyarakat dalam Pengendalian Mutu Pendidikan (Bogor, Tesis, 2010).

rendah; dan (3) masyarakat belum terlibat dalam manajemen sekolah dan belum berperan baik dalam kegiatan belajar-mengajar.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti adalah ketiga kajian terdahulu itu membahas peran masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, mutu pendidikan melalui masyarakat pesisir dan peran masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. Kajian Teori

1. Peran Masyarakat

a. Konsep Peran Masyarakat

Masyarakat diartikan sebagai kumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki persesuaian dan sadar akan kesatuan serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya.¹⁹ Peran masyarakat sering diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan.

Peran menurut tata bahasanya berasal dari kata *participate*, *participation* yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta. Peran artinya sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan *serta* artinya ikut atau turut.

¹⁹ Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 109-110.

Dengan kata lain peran adalah perhatian dan keikutsertaan seseorang terhadap sesuatu yang berbentuk fisik maupun non-fisik.²⁰

Maksud partisipasi disini adalah bentuk kepedulian, keterlibatan masyarakat yang berkepentingan dalam bentuk fisik maupun non fisik terhadap lembaga pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo) sebagai obyek kajian penelitian. Dengan ini dimaksudkan masyarakat akan tergerak untuk ikut melakukan suatu pergerakan pada lembaga pendidikan tersebut.

Menurut Yusufhadi Miarso istilah peran adalah keterlibatan secara spontan baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan²¹

Menurut Soegarda Poerbakawatja sebagaimana yang dikutip Suryosubroto peran adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan.

Sedangkan menurut Sihombing dan Indardjo, masyarakat adalah Produk lingkungan, lingkungan akan membentuk karakter masyarakatnya. Karena pendidikan ada kaitannya dengan lingkungan tersebut, maka pendidikan selalu berkaitan dengan masyarakat

²⁰ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. 3, 667.

²¹ Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2004), 706.

sehingga sesungguhnya masyarakat berada di tengah-tengah masyarakat.²²

Para pendidik profesional setuju bahwa masyarakat dan terutama orang tua memberikan sumbangan penting bagi pekerjaan mereka. Peran yang diminta biasanya berupa dukungan dari masyarakat atas apa yang sedang dicoba dilakukan madrasah. Yakni para guru dan kepala madrasah dukungannya pun berupa penyediaan tenaga kerja dan material bangunan dan pemeliharaan gedung yang menjamin bahwa para siswa mengerjakan pekerjaan rumah mereka.

Oleh karena itu tingkat peran masyarakat yang rendah dianggap sebagai kegagalan masyarakat untuk menghargai nilai pendidikan. Pendidikan harus dikaitkan kepada kebutuhan-kebutuhan produksi masyarakat, sekolah-sekolah membantu memikul biaya operasionalnya sendiri dan menjadi bagian integral dalam komunitas yang mereka layani.²³

Peran masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, ketrampilan dan jasa. Keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya peran aktif dari masyarakat ini diharapkan akan

²² Ibid., 706.

²³ Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 341.

dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau peran masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah diperlukan agar sekolah dapat berfungsi dengan baik.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk:

- 1) Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
- 2) Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
- 3) Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumberdaya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan.
- 4) Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.²⁴

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Tumbuhnya peran aktif untuk membangun pendidikan

²⁴ Miarso, Menyemai Benih Teknologi., 709.

yang bermutu dan mandiri merupakan implementasi otonomi pendidikan sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Salah satu wujud dari peran tersebut adalah dengan dibentuknya komite sekolah

b. Bentuk dan Sifat Peran Masyarakat

Peran dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Peran menurut Effendi sebagaimana yang dikutip Siti Irene menjelaskan peran terbagi atas vertikal dan horizontal. Disebut peran vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam peran horizontal masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berperan horizontal satu dengan lainnya. Peran semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.²⁵

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa contoh peran masyarakat dapat dilakukan melalui bentuk peran, bidang peran, dan cara berperan. Adapun penjelasan secara detailnya dapat dicontohkan sebagai berikut:

²⁵ Irene A.D, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, 58.

1. Bentuk peran masyarakat seperti; Dewan Pendidikan, komite sekolah, persatuan orang tua siswa, perkumpulan olah raga, perkumpulan kesenian, organisasi-organisasi lain.
2. Bidang peran masyarakat seperti; alat-alat belajar, dana, material untuk bangunan, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah.
3. Cara berperan masyarakat seperti; ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, ikut bazar.²⁶

Menurut pasal 4 Peranturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, peran masyarakat berbentuk:

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah di semua jenjang pendidikan, kecuali jenjang pendidikan kedinasan.
- 2) Pengadaan dan pemberian tenaga pendidikan.
- 3) Pemberian bantuan tenaga ahli.
- 4) Pengadaan dana dan pemberian bantuan berupa wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- 5) Pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan pemerintah.
- 6) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

²⁶ Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 188.

- 7) Pemberian kesepakatan untuk magang dan atau latihan bekerja kepada peserta didik.
- 8) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- 9) Pemberian pelatihan manajemen bagi penyelenggara pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional.
- 10) Pemberian bantuan berupa pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan.²⁷

Sedangkan menurut Made Pidarta, bidang peran masyarakat dalam pendidikan antara lain: 1) alat –alat belajar, 2) kurikulum terutama yang lokal, 3) dana, 4) material untuk bangunan, 5) auditing keuangan, 6) control terhadap kegiatan-kegiatan sekolah.²⁸

Bentuk-bentuk peran masyarakat tersebut perlu disosialisasikan secara luas karena selama ini baru nampak peran masyarakat berupa pengadaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu memberikan dorongan dan motivasi agar bentuk peran lebih meningkat.

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang biasa digunakan sekolah-sekolah yang efektif, melalui kunjungan keluarga, pertemuan dengan orang tua siswa, sukarelawan masyarakat yang menaruh

²⁷ Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relation) (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 84.

²⁸ Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 188.

perhatian dalam dunia pendidikan, dan perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau pertimbangan pendidikan²⁹

Seperti yang dikemukakan oleh Clark yang dikutip Nurkholis untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school based dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya sedang belajar di sekolah. Kedua, home based dengan cara orang tua mengawasi anaknya dalam belajar dan ikut membantu dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran.³⁰

Sedangkan menurut Mulyasa, ada beberapa upaya untuk menggalang peran masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Pertama, menawarkan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mau berperan baik berupa hukuman, denda, dan kerugian-kerugian yang harus diderita oleh pelanggar. Kedua, menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berperan. Ketiga, melakukan persuasi bahwa keikutsertaan masyarakat akan menguntungkan masyarakat itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, menghimbau masyarakat dalam berbagai kegiatan. Kelima, menghubungkan masyarakat dengan layanan sekolah yang baik. Keenam, menggunakan tokoh masyarakat yang memiliki khalayak banyak untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah. Ketujuh, menghubungkan keterlibatan

²⁹ Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi (Jakarta: Grasindo, 2005),124

³⁰ Ibid., 126

masyarakat dalam kegiatan sekolah dengan kepentingan mereka. Kedelapan, menyadarkan masyarakat untuk ikut berperan dalam berbagai kegiatan sekolah untuk mewujudkan aspirasinya.³¹

c. Landasan Hukum Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Dasar hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pendidikan nasional sangatlah penting, mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:

- 1) Pada pasal 6 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.³²
- 2) Pada pasal 8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

³¹ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 150.

³² Miarso, Menyamai Benih Teknologi, 713.

- 3) Pasal 9 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.³³

Pada pasal 6, 8, dan 9 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Hak masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di sekolah antara lain adalah ikut berperan dalam program pendidikan di sekolah mulai dari membuat visi, misi sekolah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik setempat.

Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah berupa ikut berperan memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu berupa tenaga, ide (pemikiran), pemberian bantuan buku, alat pendidikan, dan dana. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”³⁴

Dari pasal tersebut dapat didefinisikan bahwa sumber pendanaan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) melainkan pula ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, sumber pendanaan dibiayai secara

³³ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 7.

³⁴ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 20.

bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga. Organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.³⁵

Berdasarkan dari undang-undang tersebut dapat disampaikan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat meliputi perseorangan, kelompok masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu pula masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sebagai sumber daya manusia yang merupakan input pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, sebagai berikut: “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah”.³⁶

Pada pasal tersebut, masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di sekolah dapat

³⁵ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 23.

³⁶ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 111.

melalui organisasi atau wadah seperti komite sekolah dan dewan pendidikan

Masyarakat di samping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat difahami bersama, sehingga peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin besar.

2. Peran Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Menurut ketentuan yang berlaku secara Nasional, nama komite sekolah berlaku untuk tingkat sekolah dan nama dewan pendidikan berlaku untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam praktiknya, pemberian nama pun masih terjadi kerancuan karena alasan kabupaten/kota sudah otonomi daerah, jadi bebas menentukan nama sendiri.³⁷

Pemberdayaan peran masyarakat diwadahi dengan pembentukan Dewan/Komite Sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan stakeholder sekolah, serta badan yang berfungsi untuk membantu sekolah meningkatkan kinerjanya bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu. Hubungan yang harmonis antara sekolah dengan

³⁷ Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 508.

masyarakat yang sadar akan pendidikan sangat dibutuhkan. Masyarakat disebut sebagai lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis.³⁸ Dari hubungan tersebut diharapkan masyarakat mempunyai derajat kepemilikan atau rasa memiliki. Peran masyarakat yang rendah dianggap sebagai kegagalan masyarakat untuk menghargai nilai pendidikan. Pendidikan harus dikaitkan kepada kebutuhan-kebutuhan produksi masyarakat, sekolah-sekolah membantu memikul biaya operasionalnya sendiri dan menjadi bagian integral dalam komunitas yang mereka layani.³⁹

Jenis masyarakat yang dijalin sekolah untuk bekerjasama adalah kelompok orang tua, kelompok asosiasi, kelompok praktisi, kelompok akademisi, kelompok pengusaha, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat diperlukan agar berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan peran. Peningkatan peran masyarakat dipilah dalam dua kategori, yaitu peran dalam bentuk kontribusi pembiayaan dan kategori peran dalam bentuk pemikiran dan tenaga/pemikiran. Sementara peran masyarakat dalam bentuk tenaga dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan gedung sekolah. Peran masyarakat dalam pemikiran ikut berperan aktif dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian program persekolahan,

³⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 157.

³⁹ Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 341.

penyusunan RAPBS sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri melalui organisasi dewan/komite sekolah⁴⁰

b. Prinsip Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan dengan tiga prinsip yaitu transparan, akuntabel dan demokratis. Sedangkan mekanisme pembentukan komite sekolah melalui tujuh langkah: (1) mengadakan sosialisasi tentang rencana pembentukan komite sekolah, (2) menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat, (3) menyeleksi calon anggota, (4) mengumumkan nama-nama calon anggota, (5) menetapkan nama-nama calon terpilih, (6) mengadakan pemilihan pengurus dan anggota, dan (7) menetapkan nama pengurus dan anggota.⁴¹

Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari orang tua siswa/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industry, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni, dan unsur dewan guru. Bervariasi anggota komite sekolah diharapkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah semakin besar dalam bentuk pemberian pertimbangan dan pendukung dalam penentuan pelaksanaan kebijakan, pengontrol dalam rangka transparansi dan

⁴⁰ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 296-297.

⁴¹ Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, 209.

akuntabilitas, serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat luas.⁴²

c. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Dalam konteks sekolah, komite sekolah menjadi representasi dari masyarakat. Komunikasi, kordinasi, konsolidasi dan ekspansi harus terus dilakukan dengan komite sekolah, sehingga program-program yang dilakukan mendapat dukungan publik secara luas.⁴³

Peran ialah adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Peran masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Peran masyarakat dapat juga diartikan sebagai peran sempit dan peran luas. Peran luas diartikan sebagai demokrasi politik adalah masyarakat yang menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau pembangunan. Sedangkan arti peran sempit adalah keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri.⁴⁴

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian

⁴²Zainuddin, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 49.

⁴³Jamal Ma'ruf Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 196.

⁴⁴Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 88.

mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.⁴⁵ Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁴⁶Selanjutnya sebagai kordinator yaitu dengan mengkordinasikan kepentingan sekolah dengan kebutuhan bisnis di lingkungan masyarakat.⁴⁷

Peran dan fungsi komite sekolah memiliki empat peran sebagai berikut, (1) pemberi pertimbangan, dalam pemberian pertimbangan disini peran masyarakat sebagai pengambilan keputusan yang rasional, persuasif dan melaksanakan perundingan dari tiap masalah⁴⁸ (2) pendukung, dalam peran ini masyarakat memberikan peran dan perannya terhadap sekolah dan mendukung untuk peningkatan ilmu dan pemerataan pendidikan, dalam sumber lain peran masyarakat sebagai pendukung ialah adanya dukungan yang berwujud finansial,

⁴⁵ Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 bagian 1.

⁴⁶ Ibid., 37.

⁴⁷ Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 128.

⁴⁸ Wahjo Sumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 342.

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan⁴⁹ (3) pengawas dalam peran ini masyarakat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan⁵⁰, (4) mediator dalam peran ini komite berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.⁵¹ Keempat peran komite sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.⁵²

Peran masyarakat melalui komite sekolah harus diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah yang mencakup.

- 1) Komite sekolah merupakan patner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah.
- 2) Pengembangan perencanaan strategik sekolah dengan perumusan program-program prioritas sekolah.
- 3) Pengembangan perencanaan tahunan sekolah
- 4) Melakukan monitoring internal dan evaluasi diri secara regular serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah.

⁴⁹ Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87

⁵⁰ Ibid., 88

⁵¹ Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik (Jakarta: Predana Media Group, 2013), 64.

⁵² Sri Renani Pantjastuti, Komite Sekolah: Sejarah Dan Prospek Di Masa Depan (Yogyakarta, : Hikayat Publishing, 2008), 81.

- 5) Menyusun laporan tahunan sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah.
- 6) Melakukan review sekolah
- 7) Melakukan survey pendapatan sekolah terhadap stakeholder sekolah.
- 8) Memantau kinerja sekolah yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler.⁵³

Dengan demikian, jelas sekali bahwa peran masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan sekolah. Untuk itu, sekolah perlu memanfaatkan sebaik-baiknya, paling tidak bahwa pendidikan harus dapat mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan mendapatkan pengalaman langsung sehingga mereka dapat memiliki pengalaman yang kongret dan mudah diingat.
- 2) Pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat.
- 3) Di masyarakat banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum mengetahuinya.

⁵³ Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 243-244.

- 4) Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang yang terdidik dan anak didikpun membutuhkan masyarakat.

Dari sumber di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite sekolah memberikan arti penting bagi sekolah sebagai komunikasi antar masyarakat dengan sekolah. Peran dan fungsi tersebut bisa dilakukan dengan pertimbangan, pendukung dan pengawas serta mediator yang tentunya harus saling bersinergi.

d. Tujuan Komite Sekolah

Ada tiga butir tujuan yang secara eksplisit disebutkan sebagai tujuan Komite Sekolah. Pertama, adalah badan yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, menciptakan suasana dan kondisi daerah dan sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.⁵⁴

e. Bentuk-bentuk Peran Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah

Dalam istilah peran masyarakat dapat dilihat dari ukuran peran masyarakat itu sendiri, berikut bentuk peran masyarakat dapat diukur melalui keikutsertaan masyarakat menanggung biaya sekolah baik yang termasuk katagori bantuan pembangunan yang populer dengan

⁵⁴ Pantjastuti, Komite Sekolah., 207.

istilah dana sumbangan pendidikan maupun iuran bulanan peserta didik. Peran yang berlaku universal adalah kerja sama yang erat antara perencana di sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah dalam menyusun rencana strategis melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan kualitas sekolah. Peran mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan, dan lingkungan. Peran ini berkembang menjadi (1) peran dalam mengambil keputusan dan kebijakan, (2) partisipasi dalam melaksanakan, (3) peran memperoleh keuntungan, dan (4) peran dalam mengevaluasi.⁵⁵

Pertama, peran dalam pengambilan keputusan. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat dalam berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Peran dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

⁵⁵ Sagala, Manajemen Strategik, 238-239.

Kedua, peran dalam pelaksanaan. Peran ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

Ketiga, peran dalam pengambilan manfaat. Peran ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan.⁵⁶

Keempat, peran dalam evaluasi. Peran ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Peran ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Desentralisasi pendidikan memerlukan peran masyarakat. Dalam hal ini tujuan peran sebagai upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan. Bentuk partisipatif yaitu dalam Manajemen Berbasis Sekolah, peran orang tua dalam program mutu, komite sekolah, pembiayaan sekolah, mengatasi problem anak, peran dalam disiplin sekolah, peran edukatif dalam perspektif siswa dan peran guru

⁵⁶ Dwiningrum, Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, 61-62.

dalam resiliensi sekolah. Bentuk-bentuk peran yang terjadi pada satuan pendidikan dan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang secara umum dideskripsikan pada tabel 2.1:⁵⁷

Tabel: 2.1
Bentuk Peran Masyarakat

Bentuk	Aktivitas	Masalah
Peran dalam MBS	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak masyarakat bermusyawarah dengan sekolah. • Pemerintah menyediakan sarana-prasarana sekolah. • Komite sekolah berperan aktif. • Pemanfaatan potensi yang ada • Masyarakat memiliki gotong royong 	Berdasarkan tangga peran belum semua sekolah mampu menggerakkan peran masyarakat pada tangga yang tertinggi
Peran masyarakat dalam pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan SDM secara profesional. • Stakeholder mendukung program sekolah. • Menghadiri pertemuan sekolah untuk mengetahui perkembangan siswa. • Membantu murid belajar Mencari sumber-sumber lain/pendukung untuk memecahkan masalah pendidikan 	Belum semua masyarakat, khususnya orang tua pada sekolah menyadari bahwa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan pendidikan.

Dukungan peran masyarakat memiliki peran dan fungsi terhadap kemajuan sekolah dan peran tersebut dapat diwujudkan dari beberapa tingkatan. Berikut tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tujuh

⁵⁷ Irene A.D, Desentralisasi dan Partisipasi, 144

tingkatan, yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat tinggi. Tingkatan tersebut terinci sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis peran serta masyarakat ini adalah jenis yang paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.
- 2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga. Pada peran serta masyarakat ini, masyarakat berperan dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang/atau tenaga.
- 3) Peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan tersebut dengan mematuhi.
- 4) Peran serta melalui adanya konsultasi. Orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pelajaran yang dialami anaknya.
- 5) Peran serta dalam pelayanan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.

⁵⁸ Asmani, Manajemen Sekolah, 199.

- 6) Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasi/dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orang tua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan penting pendidikan. Dapat juga berperan dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah siap menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu dan lain sebagainya.
- 7) Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa peran dan fungsi masyarakat dalam wadah komite harus pula diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah yaitu mencakup.⁵⁹

- 1) Komite merupakan patner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah. Program-program akademik yang ditunjukan pada kepentingan peserta didik harus mendapat dukungan dari komite kepala sekolah, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan kesediaan biaya yang diperlukan. Membangun saling pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun antara sekolah dan komite sekolah.

⁵⁹ Sagala, Peningkatan Mutu Pendidikan, 243-244.

- 2) Pengembangan perencanaan strategik sekolah dengan merumuskan program-program prioritas sekolah, sasaran-sasaran pengembangan sekolah, strategi pencapaian sasaran, pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran pengembangan sekolah. Analisis kebutuhan dan penyusunan perencanaan dilaksanakan bersama komite sekolah.
- 3) Pengembangan perencanaan tahunan sekolah. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan strategik sekolah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan operasional sekolah yang bentuk program sekolah disertai perencanaan anggaran biaya sekolah.
- 4) Melakukan monitoring internal dan evaluasi diri secara regular, serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah.
- 5) Menyusun laporan tahunan yang menggambarkan perencanaan tahunan sekolah
- 6) Melakukan survey pendapat sekolah terhadap stakeholder sekolah.
- 7) Menyelenggarakan “hari buka” bagi orang tua dan masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan internal sekolah.
- 8) Memantau kinerja sekolah meliputi kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata

tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstra kurikuler.

Dari paparan beberapa sumber yang dijelaskan keberadaan masyarakat sebagai wadah komite sekolah memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam menciptakan pembangunan sekolah. Peran tersebut sebagai peran serta pengambilan keputusan, pelayanan, pelaksanaan, konsultasi, kontribusi. Peran tersebut juga perlu diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah.

3. Peran Masyarakat dalam Wadah Dewan Pendidikan

a. Konsep Dasar Dewan Pendidikan

Dewan sekolah suatu lembaga yang perlu di bentuk dalam rangka pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Dengan tujuan untuk membantu menyukkseskan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian.⁶⁰

Dewan pendidikan adalah suatu badan yang bersifat mandiri dan otonom yang menganut azas kebersamaan yang diatur oleh AD dan ART. Keanggotaan dewan pendidikan ini terdiri atas 2 unsur: Pertama, unsur masyarakat yang dapat meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, yayasan

⁶⁰ E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menykseskan MBS dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 175.

penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan organisasi profesi serta perwakilan dari komite sekolah yang disepakati. Kedua, unsur birokrasi sebagai unsur tambahan seperti unsur Dinas Pendidikan setempat dan dari unsur legislatif yang membidangi pendidikan, dapat dilibatkan sebagai anggota dewan pendidikan maksimal 4-5 orang.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 disebutkan, bahwa Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan di kabupaten/kota. Dewan Pendidikan beranggotakan unsur pemerintah, sekolah, beserta jajarannya, orangtua, serta masyarakat setempat.⁶¹ Pendidikan yang modern hanya akan ditemukan di dalam masyarakat yang modern pula. Sebaliknya masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terbelakang, tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga dari segi sosiokultural.⁶²

b. Tujuan Dewan Pendidikan

Menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Dewan Pendidikan mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

⁶¹ Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Jogjakarta, Ar-ruzz Media, 2008), 255-256.

⁶² Hasbulloh, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, , 110-111.

- 3) Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu.⁶³

Masyarakat sebagai mitra pemerintahan mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶⁴ Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas, dan pendidikan di lingkungan masyarakat yang akan meneruskan hingga akhir hidupnya.

Peran masyarakat menekankan pada peran langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderman sebagaimana yang dikutip Kompri menjelaskan bahwa peran masyarakat telah mengalihkan konsep peran menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan

⁶³ Ibid., 257.

⁶⁴ H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 82.

masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang peran masyarakat meliputi⁶⁵:

- 1) Peran merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
 - 2) Peran langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan politik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
 - 3) Peran masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong peran lebih bermakna.
 - 4) Peran dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
 - 5) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik.
 - 6) Peran masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah.
- c. Peran Dewan Pendidikan

Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut.

⁶⁵ Kompri, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 150-151.

- 1) Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- 2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- 4) Mediator (links) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.⁶⁶

Dari paparan di atas dapat dijelaskan secara rinci dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Penjabaran Dewan Pendidikan ke dalam Fungsi Dewan Pendidikan

No	Peran Dewan Pendidikan	Fungsi Dewan Pendidikan
1	Pemberi pertimbangan	✓ Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) kriteria kinerja dalam bidang kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan
2	Pendukung	✓ Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan yang bermutu. ✓ Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berperan dalam pendidikan.
3	Pengontrol	✓ Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan.

⁶⁶ Fatah Syukur NC, Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 88.

Lanjutan Tabel 2.2

No	Peran Dewan Pendidikan	Fungsi Dewan Pendidikan
4	Mediator	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. ✓ Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Fungsi Dewan Pendidikan

Pertisipasi masyarakat adalah satu bentuk kerja sama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Peran tersebut antara lain berupa bentuk dalam administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kegiatan administrasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Administrasi pendidikan meliputi administrasi siswa, administrasi personal, administrasi tata usaha, administrasi sarana prasarana, administrasi kurikulum, administrasi keuangan, dan pembiayaan pendidikan, serta supervisi pendidikan.⁶⁷

Dalam fungsinya dewan pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

⁶⁷ Suryosubroto, Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat , 68.

- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan khususnya guru dan kepala satuan pendidikan dan kriteria fasilitas pendidikan dan hal yang terkait dengan pendidikan.

e. Bentuk-bentuk Peran Masyarakat Dalam Pendidikan

Pada era desentralisasi pendidikan, peran serta orang tua dan masyarakat diharapkan akan semakin bertambah besar. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat ini menjadi lebih penting, karena dua alasan sebagai berikut:

Pertama, Peran orang tua dan masyarakat yang selama ini telah diberikan kepada sekolah swasta, ternyata telah berhasil mendongkrak mutu pendidikan sekolah swasta. Sebagaimana diketahui, sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta dalam berbagai hal ternyata justru lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah negeri.⁶⁸

⁶⁸ Panjastuti, Komite Sekolah, 68.

Kedua, pelibatan peran serta guru orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efektif dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶⁹

Masyarakat sebagai lingkungan strategis memberi pengaruh signifikan terhadap model desain badan pendidikan, karena masyarakat bersifat dinamis maka desain organisasinya dirancang atau di desain untuk merespon sikap dinamis tersebut. Pilihan strategis yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam desain pendidikan antara lain adalah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan. Prinsip organisasi ini adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan sekolah secara lembaga mendukung program dan kegiatan sekolah, merespon keadaan dinamis lingkungan masyarakat berkaitan dengan sistem nilai yaitu pengaruh cultural, ekologi, demografi, agama, dan etnik. Sehingga manajemen sekolah dapat digerakkan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.⁷⁰

Peran masyarakat dalam pengembangan pendidikan perlu direvitalisasi dan direkonstruksi menjadi lebih bernuansa advokasi, mediasi, pemberdayaan, dan demokrasi. Anggota dewan pendidikan sekolah mempersilahkan para staf guna untuk mencari cara memperbaiki mutu pendidikan.⁷¹ Peran dewan pendidikan adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian dan dukungan dari

⁶⁹ Ibid., 70.

⁷⁰ Syaiful Sagala, *Budaya dan Reiventing Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), 281.

⁷¹ Jerome S., *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Perumusan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 106.

masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial.⁷² Kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah dilepaskan dari masyarakat, terutama masyarakat disekitarnya. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Itu pula sebabnya mengapa masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga dan lembaga pendidikan diharapkan bekerja sama secara erat dengan masyarakat.⁷³

Dalam kerjasama yang dapat dilakukan antara masyarakat bersama-sama dengan lembaga pendidikan disekitarnya. Program-program yang dapat dilakukan seperti memajukan proses belajar mengajar, mengintegrasikan pendidikan formal, informal, dan layanan non formal, membantu memajukan pendidikan non formal, layanan kesejahteraan keluarga, layanan bimbingan dan konseling, kerjasama dalam mencari dana pendidikan, koperasi, kegiatan rekreasi bersama, kesenian bersama, olahraga, dan sebagainya.⁷⁴

Jadi peran dewan pendidikan perlu dilakukan revitalisasi dan melakukan analisis untuk mencari cara-cara untuk memajukan dan memperbaiki mutu pendidikan. Dalam memperbaiki mutu pendidikan

⁷² Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik (Bandung: Refika Aditama, 2010), 67.

⁷³ Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendidikan Sistem (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 207-208.

⁷⁴ Ibid., 210.

itu perlu adanya keterlibatan, dukungan dan kepedulian dari masyarakat.

Bentuk peran yang dapat dilakukan masyarakat adalah:

- 1) Peran dalam proses perencanaan atau pembuatan keputusan
- 2) Peran dalam pelaksanaan program
- 3) Peran dalam pembuatan hasil
- 4) Peran dalam mengevaluasi program⁷⁵

Sedangkan menurut Hoofsteede menganalisis proses pengambilan keputusan masyarakat meliputi tahap inisiasi dan legitimasi, dan eksekusi yaitu⁷⁶:

- 1) Peran inisiasi merupakan peran yang mengundang inisiatif dari anggota masyarakat mengenai suatu kegiatan untuk masyarakat.
- 2) Peran legitimasi merupakan peran dalam tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang kegiatan.
- 3) Peran eksekusi merupakan peran pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tahapan peran di atas, peran inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibandingkan peran legitimasi dan eksekusi. Posisi masyarakat tidak sekedar sebagai obyek pembangunan saja, tetapi masyarakat dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan

⁷⁵ Rohiat, Manajemen Sekolah, 75.

⁷⁶ Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 76-77.

4. Mutu Pendidikan

a. Pengertian mutu

Secara umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa. Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Mutu terkadang dianggap sebagai sebuah konsep yang penuh teka-teki, dianggap hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu terkadang juga menimbulkan perbedaan dan pertentangan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dari para pakar.⁷⁷

Dalam pengertian umum, menurut Ishikawa dalam Toyiyb mutu dipandang sebagai “Something than contains meaning of degree from superiority of the *product, as well as goods or service*” dalam konteks pendidikan peneliti melihat bahwa mutu yang diorientasikan pada barang dan jasa pendidikan bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Artinya mutu tersebut baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat akan tetap bisa dirasakan tetapi secara tidak langsung akan memberikan sebuah kepuasan dalam konsumen pendidikan itu sendiri.

Secara lebih jauh Crosby dan Sallis dalam Thoyib menyatakan bahwa “Quality is unication of product attributes that showing its ability on full filling requirements from direct or in direct customers,

⁷⁷ Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan (Teori dan Aplikasi) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 54-55.

implisit *an unimplicit requirements*". Teks ini menjelaskan bahwa mutu tidak hanya sebagai kebutuhan masa kini tetapi mutu juga untuk kebutuhan masa depan. Kepuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang dicapai oleh lembaga pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang, dan itulah yang disebut dengan mutu⁷⁸

b. Faktor yang berpengaruh dalam mutu pendidikan

Dalam perbaikan mutu berkelanjutan harus mempunyai strategi wajib dalam paradigma peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Strategi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya mutu lembaga pendidikan melalui optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip pokok yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan antara lain dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.

- 1) Anggota dewan sekolah dan administrator harus menetapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai.
- 2) Menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peristiwanya terjadi.
- 3) Penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif.

⁷⁸ Muhammad Toyib, Manajemen Mutu Pendidikan Islam Kontemporer: Teori, fakta Dan Aksi Mutu Pendidikan Islam dalam Konteks Internasionalisasi Pendidikan Indonesia (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 16-17.

Faktor lain yang mempengaruhi mutu pendidikan ialah sebagai berikut:

- 1) Siswa terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya
- 2) Guru terutama yang menyangkut kemampuan professional, moral kerja (Kemampuan personal), dan kerjasamanya (kemampuan sosial)
- 3) Kurikulum terutama menyangkut relevansi isi dan operasionalisasi proses pembelajarannya.
- 4) Dana, sarana, dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan efektifitas dalam mendukung proses pembelajaran.
- 5) Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) terutama menyangkut peran mereka dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah.

c. Indikator mutu

Pencapaian mutu tidak terjadi begitu saja, namun dalam pelaksanaannya untuk mencapai hal tersebut harus memiliki indikator-indikator yang jelas. Indikator tersebut menurut Atkinson dalam Thoyib ada tiga hal:

- 1) Mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil akhir (Ultimate Outcome) yang merupakan esensi semua usaha dalam pendidikan. Yang menjadi ukuran tingkah laku para lulusan pada lembaga pendidikan setelah mereka terjun dalam masyarakat atau kompetisi dalam dunia kerja.

- 2) Cara lain untuk mengukur mutu adalah dengan mengukur hasil langsung pendidikannya (Immediate Outcome). Hasil itu berupa tingkah laku anak didik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
- 3) Gambaran mutu pendidikan dapat dilihat juga dari proses pendidikannya, sebab proses pendidikan dianggap menentukan langsung maupun hasil akhir pendidikan. Ukuran yang dipakai disini ialah hasil kuantifikasi kuantitas maupun kualitas faktor-faktor proses pendidikan yang dikumpulkan dengan alat ukur seperti daftar wawancara, kuisioner dan observasi. Hal ini juga dikemukakan oleh teorinya Crosby dalam Thoyib yang menegaskan bahwa mutu kompetitif dari suatu pendidikan dapat dilihat dari “input, process and product that desired by stakeholder”⁷⁹

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim mengidentifikasi ciri-ciri sekolah bermutu yaitu:

- 1) Sekolah berfokus pada pelanggaran, baik pelanggaran internal maupun eksternal
- 2) Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.

⁷⁹ Ibid., 24-25.

- 3) Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusia, sehingga terhindar dari berbagai kerusakan psikologis yang sulit untuk diperbaikinya.
- 4) Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- 5) Sekolah mengelola dan memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrument untuk berbuat benar pada masa berikutnya
- 6) Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 7) Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 8) Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreatifitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- 9) Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertical dan horizontal.
- 10) Sekolah memiliki strategi dan criteria evaluasi yang jelas.⁸⁰

Dalam sumber lain dikatakan sekolah bermutu apa bila dalam sekolah tersebut memiliki lima karakteristik yang diidentifikasi sebagai pilar mutu. Berikut lima hal yang dimaksudkan ialah, 1)

⁸⁰ Anonym, Ciri-ciri sekolah bermutu, <https://mutupendidikanindonesia.wordpress.com>, diakses 25 Mei 2016.

difokuskan pada customer, 2) adanya keterlibatan total, 3) adanya pengukuran, 4) adanya komitmen, 5) adanya perbaikan mutu secara berkelanjutan.⁸¹

Ditambahkan oleh Martimore dalam Supardi dikatakan sekolah efektif mempunyai ciri sebagai berikut: 1) Adanya visi dan misi yang jelas, 2) kepala sekolah yang professional, 3) guru yang professional, 4) lingkungan belajar yang kondusif, 5) rumah siswa, 6) manajemen yang kuat, 7) kurikulum yang luas dan berimbang, 8) penilaian dan prestasi siswa yang bermakna, 9) pelibatan masyarakat yang tinggi.⁸²

5. Mutu Sarana Pendidikan

a. Pengertian Sarana Prasarana

Sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta didik yang menuntut pendidikan. Sekolah berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pengembangan semua potensi individu terutama pengembangan potensi fisik, intelektual dan moral peserta didik. Selain guru dan peserta didik, sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam proses pembelajaran. Tanpa itu, pendidikan tidak akan tercapai sesuai dengan

⁸¹ Jerome, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Pinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 38.

⁸² Supardi, Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

tujuan yang diharapkan sehingga sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim penyusun pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar.⁸³

Secara luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan usaha ini dapat berupa benda maupun uang. Jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah.⁸⁴

Sarana pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.⁸⁵ Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja,

⁸³ Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), cet 1, hlm. 273

⁸⁴ E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep strategi, dan Implementasi, hlm. 49

⁸⁵ Kasan, Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan (Jakarta: Studia Press, 2009), 91.

kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.⁸⁶ Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olah raga maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan⁸⁷

b. Prinsip Mutu Sarana Prasarana

Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Menurut Bafadal prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip pencapaian tujuan

Pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah di lakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat di katakan berhasil bilamana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat, pada saat seorang personel sekolah akan menggunakannya.

⁸⁶ Mulyasa E, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 49.

⁸⁷ Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, strategi dan Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 2009), 115.

2) Prinsip Efisiensi

Dengan prinsip efisiensi semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah di lakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya di lengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharannya. Petunjuk teknis tersebut di komunikasikan kepada semua personil sekolah yang di perkirakan akan menggunakannya. Selanjutnya, apabila di pandang perlu, di lakukan pembinaan terhadap semua personel.

3) Prinsip Administratif

Manajemen sarana dan prasarana disekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.

4) Prinsip kejelasan tanggung jawab

Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarananya sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. hal itu terjadi maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam

pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu di deskripsikan dengan jelas.

5) Prinsip kekohesifan

Dengan prinsip kekohesifan berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah terealisasi dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik.⁸⁸

c. Manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah

Manajemen secara etimologi yang diambil dari kata “to manage” dalam Echols dan Shadily mempunyai arti mengurus, mengatur, melaksanakan atau mengelola.⁸⁹ Secara terminologi, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pada hakikatnya peran manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini sangat terkait dengan kondisi dan ukuran sekolah yang bersangkutan. Bagi sekolah yang tergolong kecil, maka sarana dan prasarana dapat langsung ditangani oleh kepala sekolah atau ditangani oleh guru yang diberi tugas dalam hal tersebut. Sedangkan untuk sekolah yang tergolong maju, maka manajemen sarana dan prasarananya harus ditangani oleh

⁸⁸ Ibrahim Bafadal, Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), cet 1, hlm. 5.

⁸⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, An English-Indonesian Dictionary, Cet. XXV (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 372

beberapa pegawai yang ahli dalam bidangnya agar dapat mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya secara optimal sekaligus dapat menunjang kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien.⁹⁰

Sarana prasarana yang perlu dimiliki sekolah meliputi gedung, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber pembelajaran, ruang praktek, media pembelajaran, bahan/material, sarana pendidikan jasmani dan olah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan kreasi, fasilitas kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik dan penyelenggara pendidikan, dan sarana serta prasarana lain sesuai tuntutan program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Ketersediaan, kesiapan, dan penggunaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting bagi penyelenggara pendidikan di sekolah. Namun hal yang lebih penting lagi adalah pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut untuk proses belajar mengajar. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan prinsip kecukupan, relevansi, dan daya guna, serta berpegang pada esensi manajemen berbasis sekolah. Untuk itu sekolah menetapkan kebijakan program tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana dengan mengacu pada standar sarana dan prasarana dalam hal⁹¹

- 1) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan.

⁹⁰ Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm 184

⁹¹ Nurdin Matry, Implementasi Dasar-dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah, hlm 117

- 2) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan.
- 3) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah.
- 4) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat.
- 5) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan

Adapun pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya meliputi: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

1) Perencanaan

Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik. Perencanaan dilakukan demi menghindarkan terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Keefektifan suatu perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya itu dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam bentuk periode tertentu. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi prinsip- prinsip:

- a) Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus betul- betul merupakan proses intelektual.
- b) Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan.
- c) Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus realistis, sesuai dengan kenyataan anggaran.
- d) Visualisasi perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan sebagainya.⁹²

2) Pengadaan

Pengadaan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Setiap usaha untuk mengadakan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala sekolah ataupun bendahara. Usaha pengadaan harus dilakukan bersama yang akan memungkinkan pelaksanaannya lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas⁹³

3) Inventaris

Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah mencatat semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan

⁹² Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya, hal. 2

⁹³ Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Micro, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 117

daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang berlaku.⁹⁴

Adapun kegiatan inventarisasi meliputi tiga hal :

a) Pencatatan perlengkapan

Tugas dari pengelola mencatat semua perlengkapan yang ada dalam buku inventaris baik itu barang yang bersifat inventaris maupun non inventaris. Barang inventaris seperti meja, bangku, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan barang non inventaris seperti barang-barang yang habis dipakai seperti, kapur, karbon, kertas, dan sebagainya.

b) Pembuatan kode barang

Kode barang merupakan sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang yang tujuannya untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan, baik dilihat dari segi kepemilikan, penanggung jawab, maupun jenis dan golongannya.

c) Pelaporan barang

Semua perlengkapan pendidikan di sekolah atau barang inventaris sekolah harus dilaporkan, termasuk perlengkapan baru kepada pemerintah, yaitu departemennya. Sekolah swasta wajib melaporkan kepada yayasannya.⁹⁵

4) Penyimpanan

Ada beberapa prinsip manajemen penyimpanan peralatan dan perlengkapan pengajaran sekolah, antara lain:

⁹⁴ Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya, hal. 55.

⁹⁵ Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Micro, hlm. 117

- a) Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan ditempat yang bebas dari faktor-faktor perusak, seperti panas, lembab, dan serangga.
 - b) Harus mudah dikerjakan baik untuk menyimpan maupun yang keluar alat.
 - c) Mudah didapat bila sewaktu-waktu diperlukan
 - d) Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu dipergunakan.
 - e) Harus diadakan inventaris secara berkala.
 - f) Tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dan tiap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang berkepentingan⁹⁶
- 5) Penataan

Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses pembelajaran di sekolah dan hampir dari separuh waktunya peserta didik belajar dan bermain di sekolah, karena itu lingkungan sekolah (sarana dan prasarana) harus aman, sehat dan menimbulkan persepsi positif bagi peserta didik. Penataan lingkungan dalam kompleks lembaga pendidikan Islam seharusnya rapi, indah, bersih, anggun, dan asri. Keadaan ini setidaknya menjadikan peserta didik merasa betah berada di lembaga pendidikan, baik sewaktu proses pembelajaran berlangsung di kelas, waktu istirahat, maupun sekedar berkunjung di sekolah.⁹⁷

⁹⁶ Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.52-53.

⁹⁷ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 172

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain:

- a) Perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot (sarana dan prasarana) yang akan dipakai dalam ruangan tersebut
- b) Kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan
- c) Jarak antara perabot satu dengan perabot lainnya.
- d) Jarak deret perabot (meja, kursi) terdepan dengan papan tulis.
- e) Jarak deret perabot (meja, kursi) paling belakang dengan tembok batas.
- f) Arah menghadap perabot.
- g) Keindahan dan keserasian.
- 6) Penggunaan

Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas berarti semua penggunaan harus ditujukan semata-mata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun prinsip efisien adalah, penggunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua sarana dan prasarana yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang.

7) Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan dengan pengadaaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi kelangsungan bangunan (building) dan perlengkapan

(equipment) serta perabot sekolah (furniture), termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta penggantian.

Program pemeliharaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, melestarikan kerapian dan keindahan, serta menghindarkan dari kehilangan atau setidaknya meminimalisasi kehilangan.⁹⁸

8) Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan cara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Tujuan diadakannya penghapusan ialah untuk mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang rusak, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, serta meringankan beban inventarisasi.⁹⁹

⁹⁸ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2007), hlm 170-171.

⁹⁹ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, hlm. 62

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin difahami secara mendalam, mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut bias berupa bisa berupa seorang pimpinan sekolah atau pimpinan pendidikan, sekelompok siswa, suatu program, suatu proses, suatu penerapan kebijakan, atau satu konsep¹⁰⁰. Untuk memahami, menghayati, realitas empiris tersebut, maka peneliti menginterpretasikan, membandingkan hasil terdahulu dan referensi sebagai bahan rujukan untuk memahami dan menginterpretasinya. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹⁰¹

¹⁰⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet V, 99.

¹⁰¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), cet III, 72.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰²

Adapun bentuk penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah penelitian kasus, karena penulis bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang latar belakang seseorang, kelompok atau lembaga, terinci dan mendalam terhadap organisasi lembaga atau gejala tertentu.¹⁰³

Dalam pendekatan penelitian ini mengarah pada memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Peneliti partisipan menggunakan teknik penelitian yaitu, observasi, wawancara dan studi dokumenter.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan kualitatif maksudnya secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁰⁴ Atau penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁰⁵ Sedangkan jenis penelitian studi kasus yaitu deskripsi intensif

¹⁰² Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

¹⁰³ Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta, Rajawali Press, 1992), 18.

¹⁰⁴ Moleong, Penelitian Kualitatif, 4.

¹⁰⁵ Saudih, Penelitian Pendidikan, 60.

dan analisis fenomena tertentu atau sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan, Jogorogo, Ngawi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pribadinya sebagai instrument penelitian yang harus mengikuti prosedur yang digunakan secara runtut tanpa ada prediksi yang diamati¹⁰⁶, hal ini tentunya harus mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data yang ada.¹⁰⁷ Ada beberapa macam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: naratif, fenomenologis, etnografis, studi kasus/multi kasus atau grounded theory¹⁰⁸, penelitian interaktif dan penelitian tindakan kelas.¹⁰⁹

Penelitian ini diharapkan dapat membangun suatu teori secara induktif dari abstraksi-abstraksi data yang dikumpulkan tentang peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan, Jogorogo, Ngawi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kasus, karena peneliti bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang latar belakang seseorang, kelompok atau lembaga, terinci dan mendalam

¹⁰⁶ Asmadi Alsa, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 32.

¹⁰⁷ Julia Branne, Memadu Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

¹⁰⁸ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

¹⁰⁹ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

terhadap organisasi lembaga atau gejala tertentu secara khusus yaitu peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti lah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang mana informan mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun instrumen yang lain hanya sebagai penunjang.

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan mengawasi obyek penelitian serta mengadakan interview langsung dengan kepala sekolah dan para guru di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peran masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Ngrayudan yang berlokasi di jalan Pondok-Ngrayudan Dusun Bungkus, desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Alasan peneliti mengambil lokasi di lembaga itu adalah dari proses observasi peninjauan awal yang peneliti lakukan peneliti menemukan masalah yang menurut peneliti layak untuk diteliti. Adapun masalah yang peneliti temukan

dukungan peran masyarakat yang belum baik hingga kemudian memberikan dampak kualitas sarana prasarana belum baik.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan bukan manusia, yang mempunyai maksud yaitu:

- 1) Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci dan data yang diperoleh melalui informan bersifat lunak (data lunak). Adapun informan yang termasuk sebagai sumber data ini yaitu:
 - a) Kepala sekolah
 - b) Ketua paguyuban wali murid
 - c) Ketua komite sekolah
 - d) Wali murid
- 2) Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan judul penelitian, dan data yang diperoleh bersifat keras (data keras)¹¹⁰. Hal ini seperti, gambar, foto, catatan atau tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

¹¹⁰ Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 55.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹¹

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹² Teknik observasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang peran masyarakat dalam wadah komite sekolah, dan wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan.

2. Interview/ wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait peran masyarakat dalam wadah komite sekolah, dan wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan interview bebas, dimana peneliti bebas menanyakan secara

¹¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 141.

¹¹² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

keseluruhan yang terkait topik masalah yang peneliti cari, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.¹¹³

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi kepala sekolah, wakil kepala hubungan masyarakat, anggota paguyuban wali murid, komite madrasah dan guru. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang peran masyarakat dalam wadah komite sekolah, dan wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, notulen, agenda, dan sebagainya.¹¹⁴ Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini sebab; pertama, merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; kedua, sebagai bukti untuk suatu pengujian; ketiga, relatif murah dan tidak

¹¹³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 155-156.

¹¹⁴ *Ibid.*, 236.

sukar diperoleh; keempat, pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang sudah diselidiki.¹¹⁵

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai peran masyarakat dalam, wadah komite sekolah, dan wadah pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan

F. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, paparan data dan kesimpulan.¹¹⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga

¹¹⁵ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217.

¹¹⁶ Jurusan Tarbiyah, *Buku Pedoman Skripsi (Syari'ah, Tarbiyah, Usuludin)* (Ponorogo : P2MP STAIN Ponorogo, 2010), 40-41.

sampai tuntas datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi

.¹¹⁷

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

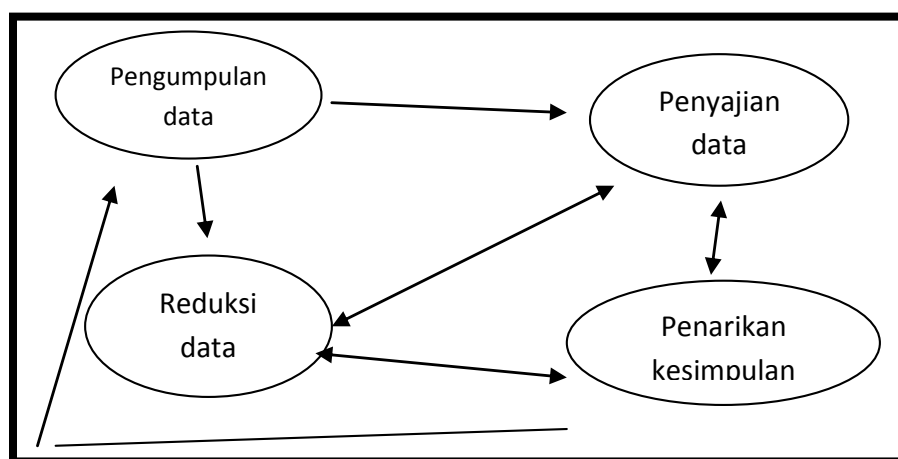
3. Conclusion Drawing (Kesimpulan Sementara)

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih krang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.¹¹⁸

¹¹⁷ Matthew B. Miles dan A. Michale Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta : UI Press, 1992), 16-20.

¹¹⁸ Ibid, 16-21.

Adapun langkah-langkah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman ditunjukkan pada gambar berikut ini



Gambar: 3.1. Skema Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, teknik penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas (validitas interbal). Cara menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan:

1. Perpanjangan Pengamatan

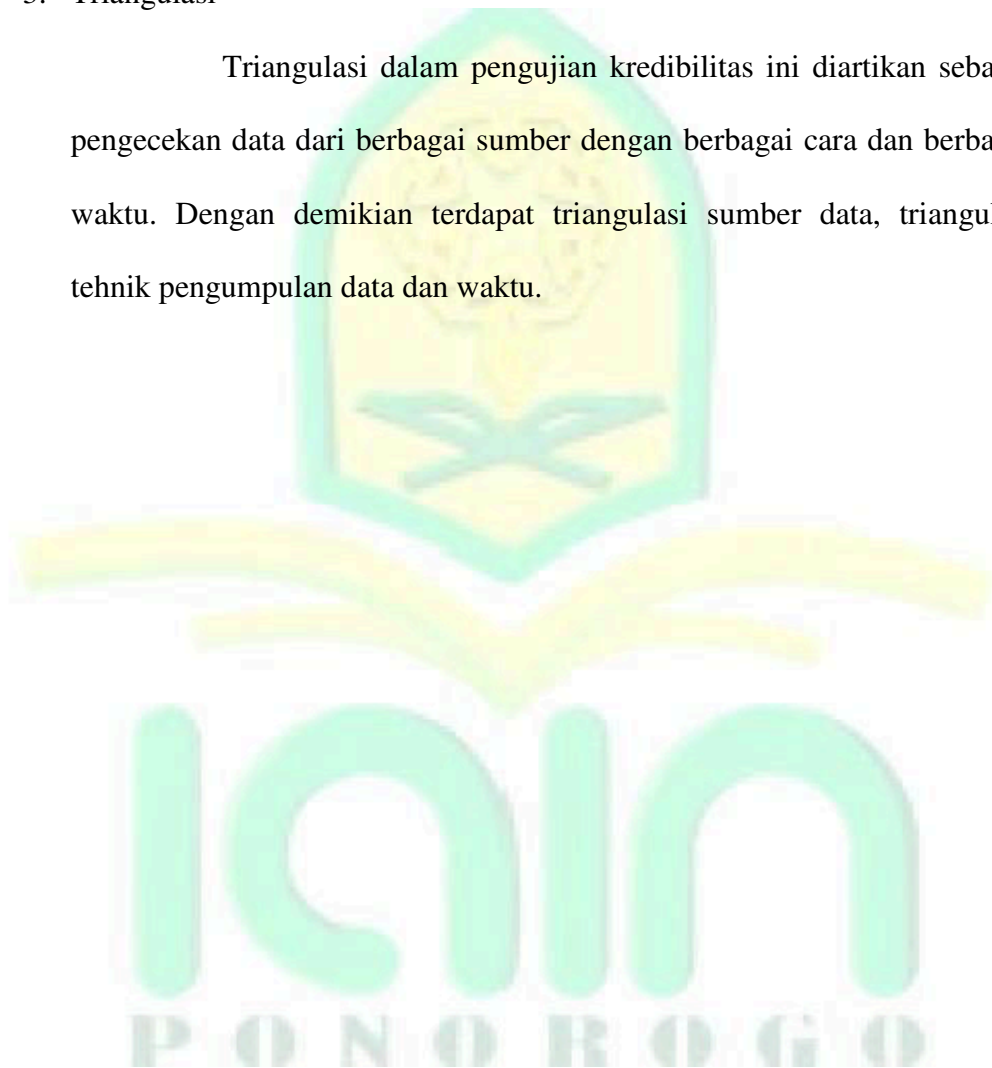
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan nara sumber yang telah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak terjadi informasi yang disembunyikan.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber data, triangulasi tehnik pengumpulan data dan waktu.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan adalah lembaga pendidikan tingkat dasar yang berciri khas Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan awalnya merupakan MI swasta yang berdiri pada tahun 1957 lalu diubah status menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan pada tanggal 17 Maret 1997 dengan adanya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.107 tahun 1997. Dengan tekad semangat ruhul jihad yang tulus ikhlas dari para guru dan didukung oleh peran serta masyarakat (orang tua murid) dan pemerintah (kemenag) dengan mendapat ridlo Allah SWT, MIN Ngrayudan telah berkembang dengan pesat. MIN Ngrayudan telah dipercaya masyarakat untuk mengelola amanah orang tua dari 252 siswa dengan 11 rombongan belajar (data tahun 2014) kerja keras dari 23 guru dan karyawan MIN Ngrayudan telah menempati madrasah ini sejajar dengan madrasah-madrasah di Jawa Timur baik di bidang prestasi akademik maupun non akademiknya.¹¹⁹

¹¹⁹ Nasrun, Wawancara, Ngawi, 22 Juni 2016.

MIN Ngrayudan berada di dusun Bungkus desa Ngrayudan kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi Jawa Timur. Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis karena terletak dekat wisata selendo sehingga banyak pendatang dari luar daerah dan terletak di jalan desa yang aman dari keramaian lalu lintas dan jauh dari polusi.¹²⁰

Selain faktor eksternal sebagaimana dipaparkan di atas, faktor internal berupa prestasi baik akademis maupun non akademis mampu menarik daya tarik tersendiri terhadap animo masyarakat kecamatan Jogorogo. Berbagai prestasi telah diukir oleh MIN Ngrayudan di tingkat lokal dan regional.

2. Letak geografis

MIN Ngrayudan terletak di desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi. Berada di wilayah selatan dari kota Ngawi sebelah selatan berbatasan dengan gunung lawu, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ngrambe, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kendal.¹²¹

Lokasi madrasah memang relatif di dalam, jauh dari jalur jalan raya. Namun masih berada dilingkungan pemukiman penduduk, bahkan gedung madrasah nya besampingan dengan rumah penduduk. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan dibangun diatas lahan 1. 569 M. Gedung madrasah terdiri dari 13 ruang kelas

¹²⁰ Bungkus adalah nama dukuh di desa Ngrayudan

¹²¹ Hasil Observasi langsung di lapangan, Ngawi, 20 Juli 2016

3. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan sebagai lembaga pendidikan dasar berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan visinya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi dan misinya.

Adapun visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terbinanya siswa yang beriman dan bertaqwa memiliki akhlaqul karimah serta memiliki daya saing dalam bidang ilmu pengetahuan seni, olahraga dan berwawasan lingkungan.

b. Misi

- 1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliyah keagamaan Islam.
- 2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah baik dalam potensi akademik maupun non akademik.

- 4) Mengembangkan kemampuan berbahasa arab dan inggris untuk anak-anak.
- 5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, segat, bersih dan indah.
- 6) Melaksanakan 7 K untuk menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif untuk belajar.
- 7) Membantu siswa untuk mengenali dan mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
- 8) Menerapkan manajemen peranf dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite madrasah.

c. Tujuan madrasah

- a) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan pengembangan strategi dan metode pembelajaran secara efektif.
- c) Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik secara potensial.
- d) Meningkatkan profesi dan standar kompetensi dan tenaga pendidik.
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- f)Melaksanakan manajemen peranf dan transparasi dalam pengelolaan madrasah.
- g) Melaksanakan efisiensi pembiayaan pendidikan.

h) Melaksanakan pengembangan perangkat penilaian pembelajaran dengan tertib.

4. Kegiatan-kegiatan Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari pagi sampai siang hari, sama seperti sekolah negeri pada umumnya. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00. disamping pokok tersebut masih banyak kegiatan atau pembiasaan lain diantaranya:

- a. Sholat Dhuha dan sholat dzuhur berjamaah, sholat dhuha dilaksanakan pada istirahat pertama jam 09.30, sedangkan shalat dzuhur dilaksanakan setelah selesai pelajaran usai. Pelaksanaannya secara bergantian dari masing-masing kelas dikarenakan tempat yang belum memadai.
- b. Muhadhoroh, kegiatan ini dilaksanakan satu satu minggu sekali yakni dilaksanakan pada hari sabtu. Semua siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan kebolehannya baik dibidang seni maupun pidato. Tujuan dari kegiatan muhadhoroh ini adalah untuk melatih siswa agar terbiasa tampil di depan temen-temennya.
- c. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijah dengan agenda menyembelih hewan qurban bersama masyarakat. Kemudian pada bulan Robi'ul awal (Maulud) dengan agenda ceramah agama serta penampilan anak-anak. Kegiatan yang ketiga adalah Isra' Mi'raj pada bulan Rojab dengan

agenda sama seperti mauled Nabi. Dengan pembiasaan tersebut diharapkan kelak anak-anak terbiasa melaksanakan ketika sudah dewasa.

Adapun kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan diluar jam pelajaran, yakni pada sore hari. Namun demikian apabila aka nada acara-acara tertentu bisa dilaksanakan pada pagi hari setelah bermusyawarah dengan warga sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran jadwal kegiatan ekstrakurikuler.¹²²

Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut, untuk MTQ dibina oleh guru di madrasah sendiri, dan untuk pramuka selain dibina oleh guru MIN Ngrayudan sendiri juga mendatangkan dari luar. Sedangkan Drum band mendatangkan pelatih khusus karena memang memerlukan keahlian khusus, namun demikian juga didampingi oleh guru-guru yang ada di madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan.

5. Data Guru dan Pegawai

Keberhasilan proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung pada peran guru yang inovatif, kreatif dan professional. Berikut akan peneliti sajikan tabel pada lampiran guru dan pegawai Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi.¹²³

¹²² Jadwal Kegiatan Ektrakurikuler

¹²³ Dokumen Administrasi

6. Jumlah Siswa

Berikut akan peneliti sajikan jumlah siswa madrasah ibtdaiyah negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi lima tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran jumlah siswa¹²⁴

B. Deskripsi Data Khusus

1. Data tentang peran masyarakat dalam wadah komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi.

Kondisi madrasah berstatus negeri yang mungkin pandangan orang tidak mungkin adanya bantuan dari masyarakat dikarenakan sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah, namun dengan upaya kepala madrasah dalam merangkul dan membuat jaringan koordinasi dengan masyarakat, maka masyarakat juga ikut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi. Dari hasil koordinasi yang dilakukan kepala madrasah mendapatkan hasil bahwa, dukungan yang dilakukan masyarakat kepada madrasah sangat tinggi. Hal ini seperti yang disampaikan bapak K selaku ketua komite sekolah sebagai berikut:

Meskipun madrasah kami negeri dan orang banyak mengatakan bahwa bantuan sepenuhnya dari pemerintah namun bapak kepala madrasah yang sekarang yang dipimpin oleh bapak Nasrun ini baik, buktinya beliau bisa mengajak masyarakat melalui saya selaku komite sekolah untuk ikut berperan aktif memajukan madrasah. Beliau juga membentuk jaringan komunikasi melalui kelompok paguyuban kelas agar hubungan dengan masyarakat tidak cukup hanya di sebuah komite sekolah¹²⁵

¹²⁴ Tabel Jumlah Siswa

¹²⁵ Kusnan, Wawancara, Ngawi, 22 Juli 2016

Untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah juga mengajak masyarakat untuk berperan pengadaan lahan baru yang akan dijadikan sebagai gedung ruang kelas baru. Dalam tahap pembebasan lahan untuk gedung ruang kelas baru dilakukan dengan pembelian tanah wakaf untuk sementara pembelian dicukupi madrasah untuk selanjutnya masyarakat mengganti. Seperti yang dijelaskan bapak W sebagai berikut:

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di lembaga kami kaitannya pembangunan gedung ruang kelas baru, pihak madrasah mengadakan pembebasan tanah dengan cara membeli tanah wakaf. Maksud pembelian tanah wakaf itu tanah tersebut dibeli dengan harga berbeda dari biasanya dan pembelian itu sebelumnya ditanggung madrasah untuk kemudian selanjutnya disampaikan masyarakat untuk memberikan bantuan seikhlasnya”.¹²⁶

Bapak W juga menjelaskan bahwa, “pembangunan gedung ruang kelas berjumlah tiga lokal itu betul dari masyarakat. Hal itu dilakukan karena adanya jumlah siswa di madrasah ibtidaiyah bertambah”.¹²⁷

Pelaksanaan pembangunan gedung ruang kelas dapat berjalan dengan lancar dikarenakan masyarakat mayoritas menyadari akan pentingnya sarana gedung ruang kelas di madrasah tersebut. Hal itu dilakukan karena jumlah kuantitas siswa di madrasah ibtidaiyah meningkat hingga akhirnya sarana prasarana gedung ruang kelas berkurang sehingga harus membuat sarana gedung ruang kelas baru seperti yang disampaikan bapak B kepada peneliti sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembuatan gedung ruang kelas itu semua lancar karena mengingat bahwa jumlah siswa di madrasah ibtidaiyah semakin meningkat sedangkan ruang kelas kurang dan kami

¹²⁶ Waloyo, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

¹²⁷ Waloyo, Wawancara, Ngawi 03 Agustus 2016.

menerima laporan dari bapak kepala bahwa rencana gedung yang akan dibuat itu gedung sementara, akhirnya dengan alasan itulah kami termotivasi dan terdorong untuk melakukan pembangunan gedung ruang kelas.¹²⁸

Hal ini juga disampaikan dari bapak K bahwa, ” selama ini dalam pelaksanaan program bersama masyarakat kendala yang ditemukan belum ada. Karena pada prinsipnya kami menggerakkan masyarakat untuk mendukung madrasah itu dilandasi dengan prinsip agama yaitu pemberian seikhlasnya.”¹²⁹

Dari hasil program yang dilakukan masyarakat kepada madrasah. Dari segi kualitas terciptanya peningkatan jumlah lulusan, yang awalnya pada tahun ajaran 2014-2015 siswa yang lulus berjumlah 250, kemudian ditahun ajaran 2015-2016 jumlah lulusan meningkat menjadi 295. Kemudian dari segi kuantitas pengaruh peran masyarakat kepada madrasah, program madrasah yang awalnya belum bisa terlaksana tahun ajaran 2014-2015 dengan dukungan peran masyarakat tahun ajaran 2015-2016 bisa terlaksana meningkat hingga 80%. Hal ini seperti yang disampaikan bapak W sebagai berikut:

Dari segi kualitas terciptanya peningkatan jumlah lulusan, yang awalnya pada tahun ajaran 2014-2015 siswa yang lulus berjumlah 250, kemudian di tahun ajaran 2015-2016 jumlah lulusan meningkat menjadi 295. Kemudian dari segi kuantitas pengaruh peran masyarakat yang dilakukan kepada madrasah, banyak program kerja yang bisa terlaksana secara meningkat. Terbukti program madrasah yang belum bisa terlaksana di tahun ajaran 2014-2015, kemudian ditahun 2015-2016 bisa terlaksana 80%.¹³⁰

¹²⁸ Isbani, Wawancara, Ngawi 03 Agustus 2016.

¹²⁹ Kusnan, Wawancara, Ngawi 03 Agustus 2016.

¹³⁰ Waloyo, Wawancara, Ngawi 7 Januari 2017.

Dalam hal peran masyarakat di madrasah ini meliputi beberapa hal yang terlibat, karena tidak ada satu atau dua hal dalam rangka peran masyarakat yang dapat dilakukan tanpa adanya pihak lain yang terkait. hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh K pada peneliti sebagai berikut:

Dalam rangka pembuatan gedung baru sebagai ruang belajar anak, bentuk peran yang dilakukan masyarakat sekitar adalah dengan cara memberi bantuan berupa semen, pasir, bambu, asbes dan kayu. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembuatan gedung baru, masyarakat ikut kerja bakti gotong royong membangun ruang belajar sebagai tempat belajar siswa¹³¹

Usaha pembangunan gedung ruang kelas tidak terlepas dari bantuan donatur. Pembangunan ruang kelas yang dilaksanakan di madrasah ibtidaiyah murni dari bantuan masyarakat yang dilakukan secara lahir batin serta dilandasi dengan rasa ikhlas. Pelaksanaan pembangunan gedung ruang kelas melibatkan masyarakat dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan sekolah. Masyarakat membantu mengeluarkan tenaga, fikiran, bahan material seperti bambu, kayu, dan lainnya. Seperti yang disampaikan bapak B kepada peneliti sebagai berikut¹³²:

Awal mula keinginan membantu madrasah karena madrasah mempercayakan kepada kami sebagai donatur pertama. Kemudian kami mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bambu dan masyarakat menyepakati. Mereka mengumpulkan bambu untuk pembangunan gedung ruang kelas, masyarakat melakukan ini semua didasarkan dengan niatan ikhlas tanpa pamrih.

Bantuan peran masyarakat juga diwujudkan dalam pemasangan pondasi lahan baru dibelakang madrasah. Lahan baru yang dipasang

¹³¹ Nasrun, Wawancara, Ngawi, 20 Juli 2016

¹³² Isbani, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016

rencana akan dibangun ruang kelas baru untuk sarana gedung belajar.

Seperti yang dijelaskan bapak W, Sebagai berikut:

Masyarakat memberikan bantuannya berupa pemasangan pondasi di lahan baru sebelah belakang madrasah. Lahan baru itu rencana akan dibangun gedung ruang kelas karena dana belum terkumpul banyak tahap awal dibangun pondasi dulu sebagai tempat lapangan sementara dengan maksud bisa digunakan siswa untuk lokasi olah raga sementara.¹³³

Informasi dari bapak K memperjelas bahwa, “Selain dari barang berupa bambu, peran yang diberikan masyarakat juga berupa tenaga dan pikiran. Langkah yang dilakukan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran ialah mereka mengadakan musyawarah untuk merencanakan pembangunan kemudian setelah adanya kesepakatan mereka baru memulai pelaksanaan pembangunan tersebut. Jadi proses pelaksanaan pembangunan gedung itu juga melibatkan masyarakat masyarakat”.¹³⁴

Bantuan yang diberikan masyarakat kepada madrasah tidak cukup hanya dengan gedung ruang belajar akan tetapi masyarakat juga ikut serta membangun musholla untuk keperluan ibadah. Musholla yang dibangun oleh masyarakat itu terletak di dekat ruang TU dan kepala sekolah dan saat ini ruangan tersebut juga dijadikan tempat belajar sementara. Seperti yang dijelaskan bapak K kepada peneliti sebagai berikut:

Selain bentuk bangunan gedung ruang kelas hal yang diberikan dari masyarakat berupa bangunan musholla sebagai sarana ibadah siswa dan guru. Musholla ini dibangun dengan maksud tujuan agar bisa digunakan untuk praktek latihan sholat. Untuk saat ini musholla juga

¹³³ Waloyo, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

¹³⁴ Kusnan, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

digunakan untuk ruang belajar sementara dikarenakan jumlah ruang kelas yang terbatas.¹³⁵

Hal ini juga disampaikan bapak W bahwa:“mushola itu memang benar juga bantuan dari masyarakat. Saat itu saya belum berada di madrasah, namun informasi yang saya dengar, betul bahwa wujud bantuan ataupun peran masyarakat yang diberikan adalah musholla”¹³⁶

Tahap pelaksanaan pembangunan gedung ruang kelas di madrasah ibtidaiyah ini, menurut data yang peneliti dapatkan, bantuan yang diberikan berupa bambu itu diambilkan dari bambu milik pribadi. Masyarakat memberikan bantuan bambu dengan jumlah yang berbeda, ada yang menyumbangkan lima bambu, tiga bambu, dua bambu dan bahkan ada juga yang hanya menyumbangkan satu bambu. Seperti yang dijelaskan bapak B sebagai berikut:

Setelah kami kumpulkan masyarakat di sekitar dusun kami lalu mereka mengumpulkan bambu-bambu. Dari jumlah bambu yang kami dapatkan, masyarakat memberikan bambu dengan jumlah yang berbeda, ada yang memberikan lima, tiga, dua dan bahkan ada juga yang hanya membawa satu. Setelah bambu terkumpul semua, kami menemui bapak kepala madrasah untuk menanyakan rencana selanjutnya.¹³⁷

Pelaksanaan gotong royong oleh masyarakat disamping memberikan bantuan berupa bambu juga dilakukannya tahap pengerjaan pembangunan gedung mulai dari awal hingga akhir. Seperti yang dijelaskan bapak W sebagai berikut:

Masyarakat dalam perannya memberikan dua bambu, ada yang lima bambu, ada yang tiga bambu semua itu diberikan sekaligus dipotong.

¹³⁵ Kusnan, Wawancara, Ngawi, 04 Agustus 2016.

¹³⁶ Waloyo, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

¹³⁷ Isbani, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

Kemudian masyarakat juga membantu pemasangan mulai awal sampai selesai. Masyarakat juga dibantu dengan pihak madrasah untuk yang laki-laki ikut mengangkat bambu sedangkan untuk yang guru putri membantu menyediakan makanan dan minuman.¹³⁸

Pernyataan ini juga dijelaskan oleh bapak K sebagai berikut:

Pembangunan gedung ruang kelas itu memang betul dari masyarakat untuk keperluan perlengkapan sarana prasarana dalam pembelajaran. Masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat itu berupa bambu guna dijadikan bahan ruang kelas dengan harapan adanya masalah kekurangan gedung ruang kelas di madrasah ibtidaiyah bisa diselesaikan dalam hal ini masyarakat membantu dengan kondisi semampunya¹³⁹

Berbeda dengan informasi yang disampaikan bapak W bahwa:

“kendala secara umum dalam pelaksanaan pengerjaan gedung tidak ada semua terlaksana dengan lancar namun hal yang menjadi sedikit kendala adalah faktor alam atau cuaca. Jika kondisi cuaca kurang mendukung, mendung, atau hujan tentunya pelaksanaan pengerjaan pembangunan ruang gedung terganggu”.¹⁴⁰

Masyarakat dalam pembangunan gedung ruang kelas tidak secara keseluruhan murni dilaksanakan sendiri akan tetapi dibantu dengan bapak-ibu guru di madrasah karena dari pihak madrasah merasa bahwa etika yang pantas yang seharusnya dilakukan apabila ada pihak yang membantu maka pihak yang terbantu juga harus ikut berperan. Sepeti yang disampaikan bapak B sebagai berikut:

Dalam pembangunan gedung ruang kelas itu tidak secara keseluruhan dilakukan masyarakat akan tetapi juga ada dari pihak madrasah yang ikut membantu menyelesaikan, seperti salah seorang guru yang bernama bapak waluyo itu juga ikut membantu dengan

¹³⁸ Waloyo, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

¹³⁹ Isbani, Wawancara, Ngawi 04 Agustus 2016.

¹⁴⁰ Waloyo, Wawancara, Ngawi 03 Agustus 2016.

mengangkat kayu. Jadi dalam rangka pembangunan itu tidak murni dilaksanakan masyarakat akan tetapi juga ada pihak lain yang ikut membantu¹⁴¹

Hal ini juga dijelaskan dari bapak K sebagai berikut:

Dalam pembangunan gedung ruang kelas itu tidak secara keseluruhan dilakukan oleh masyarakat akan tetapi dari pihak madrasah juga ikut berperan memantau proses pelaksanaan pembangunan gedung tersebut. Hal itu dilaksanakan sebagai bentuk peran serta pihak madrasah yang ikut andil dalam pelaksanaan program pembangunan gedung tersebut¹⁴²

Peranan masyarakat dalam berperan membangun gedung ruang kelas itu dilaksanakan pada waktu malam hari. Karena menurut informasi yang peneliti dapatkan mereka membantu membangun gedung ruang kelas itu dipikirkan saat waktu luang masyarakat. Mereka menganggap waktu yang efektif bagi mereka adalah waktu malam karena waktu pagi masyarakat gunakan untuk bekerja di ladang mereka masing-masing. Seperti yang disampaikan bapak B sebagai berikut:

Waktu yang diberikan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan gedung ruang kelas dilakukan saat malam hari karena mereka mempunyai kesibukan tersendiri yaitu bekerja diladang pada waktu pagi sore dan siang maka agar pelaksanaan pembangunan gedung ruang kelas bisa berjalan pembangunan tersebut dilaksanakan pada waktu malam¹⁴³

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tentunya madrasah mengadakan rapat wali murid serta mengundang ketua komite sekolah untuk dilibatkan. Ketua komite sekolah diundang dengan maksud agar aspirasi dari masyarakat bisa dikoordinasikan dengan lembaga melalui komite sekolah. Seperti yang disampaikan bapak Kusnan bahwa, “Untuk

¹⁴¹ Isbani, Wawancara, Ngawi, 03 Agustus 2016.

¹⁴² Kusnan, Wawancara, Ngawi 04 Agustus 2016.

¹⁴³ Isbani, Wawancara, Ngawi 03 Agustus 2016.

meningkatkan mutu pendidikan kami dari pihak lembaga mengadakan rapat wali murid untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana. Rapat itu dilakukan agar masyarakat mengetahui kondisi madrasah dan rapat ini dilakukan setiap ada proyek pembangunan”

Hal ini juga disampaikan bapak W, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan interaksi yang baik antara madrasah dengan masyarakat kami mengadakan rapat komite juga melibatkan masyarakat untuk membicarakan kondisi sarana prasarana. Rapat ini diadakan setiap ada program disamping itu juga diadakan setiap akhir tahun.¹⁴⁴

Di madrasah ini masyarakat juga tetap mengawasi perkembangan mutu pendidikan yang dilakukan. Melalui forum rapat wali murid sebagian masyarakat memberikan usulannya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sudah berjalan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak K sebagai berikut:

Setiap ada rapat wali murid di sekolah, kami memberikan kesempatan sesi usulan dari masyarakat yang ingin memberikan usulannya terkait perkembangan mutu pendidikan yang ada di madrasah kami meliputi proses belajar mengajar, perkembangan tingkah laku siswa, perkembangan sarana prasarana, perkembangan hasil nilai ujian dari para siswa. Hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan yang dihasilkan oleh madrasah dalam pelaksanaan mutu pendidikan¹⁴⁵

Pelaksanaan sesi tanya jawab atau usulan yang dilakukan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan madrasah dimana pelaku pemangku kepentingan yang ada di madrasah mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan bapak W sebagai berikut:

¹⁴⁴ Waloyo, Wawancara, Ngawi 03 Agustus 2016

¹⁴⁵ Kusnan, Wawancara, Ngawi 11 Oktober 2016

Dengan pelaksanaan sesi usulan yang diadakan pada saat rapat wali murid banyak hasil yang madrasah dapatkan dari usulan yang muncul dari para masyarakat. Masyarakat sangat berantusias dan perhatian terhadap jalannya program pembelajaran di madrasah kami hingga kemudian dari berbagai usulan dari para masyarakat mengenai segala kekurangan yang dihadapi madrasah kami mengetahui¹⁴⁶

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat memberi bantuan berupa bahan untuk perlengkapan pembuatan gedung yang nantinya digunakan untuk membangun gedung ruang kelas lalu pembangunan musholla yang sekarang digunakan untuk ibadah dan ruang belajar sementara, lalu pembangunan pondasi di lahan baru yang akan dibangun gedung baru kemudian masyarakat juga memberikan bantuan tenaga untuk pelaksanaan pembangunan gedung, kemudian juga membentuk jaringan komunikasi melalui kelompok paguyuban kelas. Dalam pembangunan gedung dilaksanakan dengan lancar tanpa ada halangan apapun namun yang menjadi sedikit masalah adalah kendala kondisi cuaca yang tidak menentu.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah pihak madrasah mengadakan rapat wali murid dan dihadirkan pengurus komite dan paguyuban kelas. Dalam rapat tersebut materi yang dibahas meliputi kondisi sarana prasarana lembaga, pembelajaran siswa, aspirasi dan usulan dari masyarakat untuk kemajuan lembaga. Rapat itu diadakan secara rutin setiap akhir semester dan akhir tahun tetapi jika akan ada program proyek

¹⁴⁶ Waloyo, Wawancara, Ngawi 11 Oktober 2016

pembangunan rapat itu juga diadakan sebelum membuat program perencanaan pembangunan.

2. Data tentang Peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi

Dewan pendidikan juga harus dapat mendorong masyarakat untuk memiliki sikap peduli terhadap madrasah. Karena dengan tindakan dorongan yang dilakukan dewan pendidikan di madrasah ibtidaiyah tersebut, masyarakat akan mengetahui bahwa keberadaan madrasah di masyarakat sebetulnya juga memberikan pengaruh positif mencerdaskan anak bangsa di wilayahnya.

Seperti yang disampaikan ibu N bahwa, “Adanya dewan pendidikan di lembaga ini memiliki harapan dapat mendorong, merayu masyarakat untuk ikut aktif peduli terhadap madrasah karena tanpa adanya dorongan, dukungan dari masyarakat tersebut lembaga mengalami kesulitan dalam memajukan kualitas mutu pendidikan di lembaga ini”.¹⁴⁷

Untuk meningkatkan hubungan baik antara masyarakat, wali murid dan madrasah disamping peran komite madrasah perlu adanya pembentukan paguyuban wali murid yang dibentuk melalui forum rapat. Dalam kelompok paguyuban wali murid itu mempunyai tugas menerima saran yang diusulkan dari setiap wali murid ataupun masyarakat kepada madrasah, kelompok paguyuban ini bisa beranggotakan 5 orang dari tiap

¹⁴⁷ Nanik, Wawancara, Ngawi, 01 Agustus 2016

kelasnya seperti yang disampaikan ibu N anggota dewan pendidikan di madrasah sebagai berikut:

Usaha kami dalam upaya membuat jaringan antara pihak madrasah, wali murid, dan masyarakat disamping membentuk komite madrasah kami juga membentuk paguyuban wali murid di setiap kelas, tugas dari paguyuban kelas ini adalah mewakili setiap kelasnya untuk menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Wali murid terkait pengembangan dan peningkatan mutu madrasah, harapan kami dengan pembentukan paguyuban wali murid yang ada di setiap kelas bisa ikut memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan tenaga dalam pembangunan gedung ruang kelas

Pembentukan paguyuban wali murid di samping sebagai sarana penyampaian aspirasi dari masyarakat juga berperan sebagai bahan pertimbangan antara dewan pendidikan dengan masyarakat melalui ketua paguyuban. Setiap rencana program yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan masyarakat dewan pendidikan meminta pertimbangan kepada pengurus paguyuban wali murid seperti yang disampaikan bapak W, sebagai berikut:

Kami membentuk kelompok paguyuban wali murid di madrasah ini dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dan arahan saat melakukan program-program seperti: rehab gedung, pembangunan ruang gedung, pembangunan mushola, pembangunan kantor dan pembangunan perpustakaan. Jadi adanya kelompok paguyuban wali murid perwakilan dari setiap kelas dengan maksud bisa untuk diajak memberikan pertimbangan sebelum melakukan program.¹⁴⁸

Kelompok paguyuban wali murid di Madrasah Ibtidaiyah ini memberikan tambahan dukungan kepada madrasah. Kelompok paguyuban wali murid juga mempunyai peranan dalam menentukan program yang telah direncanakan komite sekolah. Dalam hal ini akan

¹⁴⁸Waloyo, Wawancara, 02 Agustus 2016.

lebih meringankan tugas dari komite sekolah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada madrasah. Hal ini dijelaskan oleh bapak K sebagai berikut:

Adanya kelompok paguyuban wali murid sedikitnya bisa membantu kerja kami selaku ketua komite sebagai mitra kerja antara masyarakat dan madrasah. Karena jumlah siswa di madrasah ibtidaiyah disini sangat banyak dan tentunya setiap wali murid yang ada disini mempunyai berbagai macam pemikiran dalam mendukung sarana prasarana dan bahkan ada juga yang sama sekali belum memberikan dukungannya. Menyikapi hal itu semua Madrasah Ibtidaiyah disini menambahkan kelompok paguyuban wali murid di madrasah dengan harapan bisa mengkoordinasikan setiap kelasnya untuk menyamakan pemikiran mencapai kesepakatan.

Peran membantu madrasah dalam bidang pembangunan, dewan pendidikan menemukan berbagai kendala saat mengadakan kerja sama dengan masyarakat, diantaranya ada sebagian dari masyarakat yang belum sepenuhnya ikut berperan gotong royong menyumbangkan tenaganya dalam memajukan kualitas pendidikan di madrasah. Namun dengan upaya dewan pendidikan bersama pihak sekolah kendala itu dapat diselesaikan melalui forum rapat yang diadakan antara masyarakat, dewan pendidikan dan juga madrasah didalam rapat itu diberikan kesempatan bagi tiap individu untuk menyampaikan masalahnya mengapa belum bisa ikut berperan gotong royong membangun gedung hingga akhirnya tiap usulan yang disampaikan masyarakat dapat dipaparkan dan didengarkan pihak sekolah, dewan pendidikan dan juga masyarakat lainnya hingga akhirnya ditemukan solusinya pemecahannya.

Seperti yang disampaikan bapak K selaku ketua komite madrasah, beliau sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi dewan pendidikan disini masalah masyarakat yang belum memberikan tenaganya, dukungan, serta bantuannya untuk ikut membantu madrasah. Hal ini terbukti saat dimulainya gotong royong pembangunan gedung ruang kelas di Madrasah Ibtidaiyah ini masih sedikit untuk dihari pertama kemudian dihari kedua diadakan musyawarah rapat yang dihadiri dewan pendidikan, pihak sekolah dan beberapa personel dari masyarakat tentang keluhan yang dihadapi dan disampaikan secara terbuka sampai ketemu solusi pemecahannya.¹⁴⁹

Keberhasilan madrasah tidak akan bisa terwujud tanpa adanya peran dari dewan pendidikan. Dewan pendidikan dalam memajukan madrasah dapat dilakukan dengan berbagai hal diantaranya adanya dukungan bantuan berupa buku pelajaran, bantuan ruang gedung ruang kelas dan bantuan alat pembelajaran lainnya untuk memajukan kualitas sarana prasarana, hal ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Nasrun selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo sebagai berikut:

Dewan pendidikan di sini mempunyai aktivitas dan peran besar di madrasah ini, diantaranya memberikan bantuan buku sebagai sarana penunjang pembelajaran, ikut membantu menggalangkan dana sebagai pembangunan gedung ruang kelas, disamping itu usaha yang dilakukan dewan pendidikan dalam mengembangkan mutu madrasah adalah mengadakan pelatihan bagi guru-guru agar kemampuan guru bisa meningkat sehingga kemudian bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik.¹⁵⁰

Peran masyarakat dalam dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mengawal bantuan berupa dana dari pemerintah

¹⁴⁹ Kusnan, Wawancara, Ngawi 01 Agustus 2016

¹⁵⁰ Nanik, Wawancara, Ngawi, 01 Agustus 2016.

daerah agar bisa tersalurkan secara menyeluruh langsung kepada lembaga. Karena dalam pemberian bantuan berupa dana untuk rehabilitasi gedung, pembangunan gedung, pembangunan ruang kelas, pembangunan perpustakaan yang semua itu sifatnya bantuan terkadang bentuk pencairannya tidak menyeluruh dengan jumlah total yang ditetapkan, maka dewan pendidikan di lembaga madrasah ibtidaiyah tersebut yang harus bertanggung jawab mengawalinya. Seperti yang disampaikan bapak W sebagai berikut:

Peran dewan pendidikan disini disamping memberikan bantuan berupa buku pelajaran, masyarakat juga berperan menggalakan dana untuk keperluan pembangunan madrasah khususnya sarana prasarana, mengadakan pelatihan bagi guru agar memiliki kualitas yang baik dalam mengajar dewan pendidikan disini juga ikut mengawal alur bantuan dengan jumlah yang diberikan agar sampai sepenuhnya pada madrasah, soalnya kadang jika tidak dikawal seperti itu jumlah dana yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diberikan.¹⁵¹

Peran dewan pendidikan di madrasah juga memberikan masukan pertimbangan dan juga rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD. Tindakan ini dilakukan dengan upaya bentuk pengawasan dari madrasah kepada pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan bapak Nasrun “Peran dewan pendidikan di madrasah kami ialah memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai kebijakan program pendidikan, kriteria tenaga kependidikan,

¹⁵¹ Waloyo, Wawancara, Ngawi, 01 Agustus 2016

khususnya guru dan satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan”¹⁵²

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti saat dewan pendidikan datang ke sekolah, beliau mengatakan kepada kepala madrasah untuk rencana bantuan yang diberikan bantuan berupa gedung ruang kelas. Dewan pendidikan dalam memperlakukan madrasah untuk kemajuan madrasah dilakukan dengan kerja sama dengan madrasah, artinya dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan beliau melibatkan anggota madrasah sebagai mitra kerja dan juga dilakukan dengan gotong-royong, bersama-sama membangun madrasah agar tercipta rasa kekeluargaan yang harmonis antara dewan pendidikan dan madrasah dan juga dapat menambah semangat kerja.

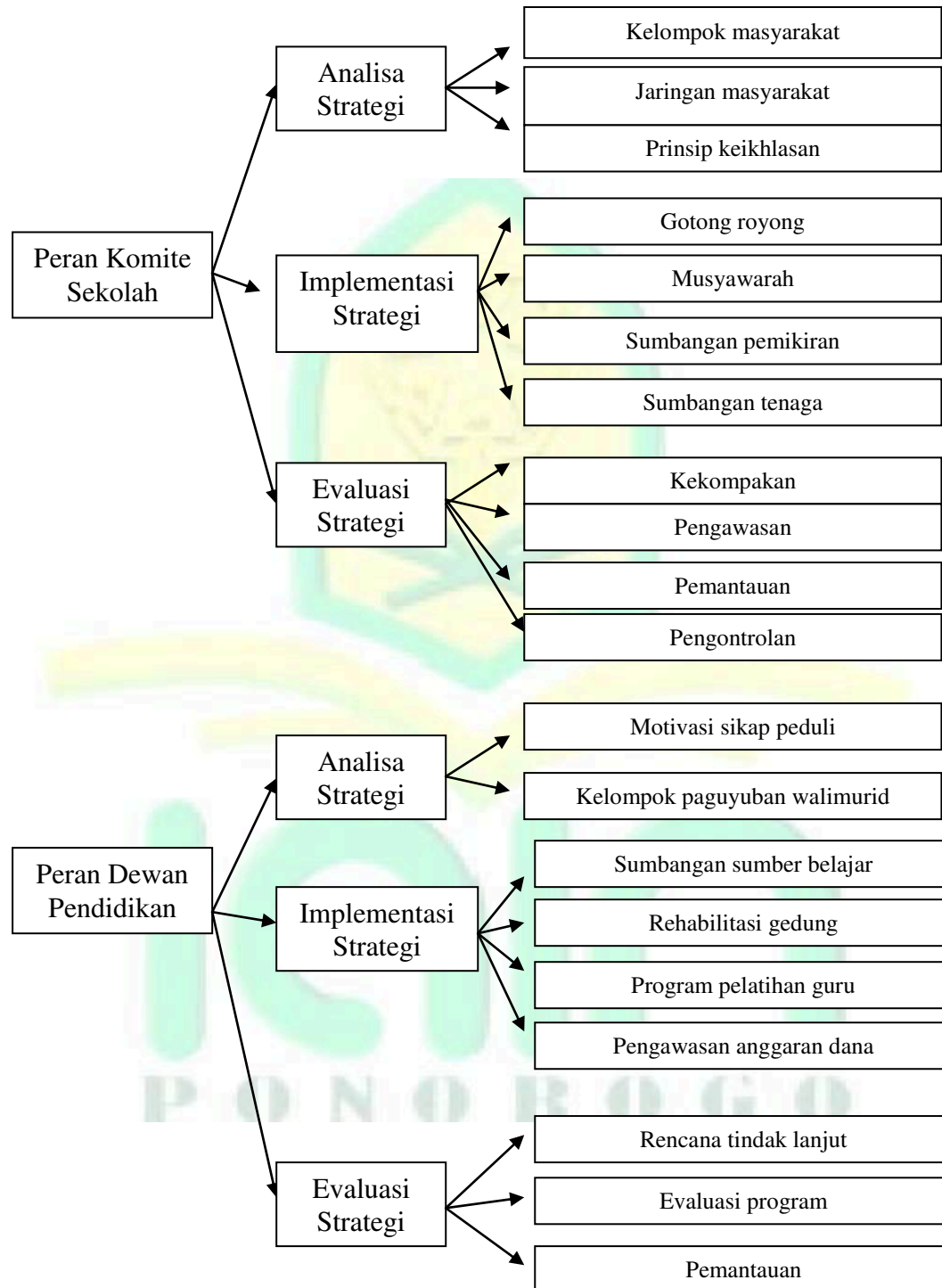
Dari hasil paparan data dapat dikatakan bahwa peran dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan ialah memberikan bantuan alat-alat tulis sebagai sarana penunjang pembelajaran, ikut membantu penggalangan dana sebagai pembangunan gedung ruang kelas. Di samping itu usaha yang dilakukan dewan pendidikan dalam mengembangkan mutu madrasah adalah mengadakan pelatihan bagi guru-guru agar kemampuan para guru bisa lebih meningkat. Di samping itu peran dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ini ialah ikut mengawal alur bantuan dengan jumlah yang diberikan agar sampai sepenuhnya pada madrasah, soalnya kadang jika

¹⁵² Nasrun, Wawancara, Ngawi 11 Oktober 2016

tidak dikawal seperti itu jumlah dana yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diberikan, kemudian dapat mendorong, merayu masyarakat untuk ikut aktif peduli terhadap madrasah,



Berikut dapat digambarkan hasil temuan dalam sebuah skema sebagai berikut:



Gambar: 4.1. Skema temuan penelitian peran masyarakat sebagai komite dan dewan pendidikan

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisa Data tentang Peran Masyarakat Sebagai Wadah Komite dalam Meningkatkan Mutu pendidikan

Peran mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan, dan lingkungan. Peran ini berkembang menjadi (1) peran dalam mengambil keputusan dan kebijakan, (2) partisipasi dalam melaksanakan, (3) peran memperoleh keuntungan, dan (4) peran dalam mengevaluasi.¹⁵³

Pertama, peran dalam pengambilan keputusan. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat dalam berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Peran dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, peran dalam pelaksana. Peran ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan

¹⁵³ Sagala, Manajemen Strategik, 238-239.

perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

Ketiga, peran dalam pengambilan manfaat. Peran ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan.¹⁵⁴

Keempat, peran dalam evaluasi. Peran ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Peran ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Peran yang diberikan masyarakat dalam wadah komite di Madrasah Ibtidaiyah Negeri diantaranya masyarakat memberi bantuan berupa semen, pasir, bambu, asbes, kayu yang nantinya digunakan untuk membangun gedung ruang kelas, pembangunan musholla yang sekarang digunakan untuk ibadah dan ruang belajar sementara, pembangunan pondasi di lahan baru yang akan dibangun gedung baru kemudian masyarakat juga memberikan bantuan tenaga untuk pelaksanaan pembangunan gedung, kemudian juga membentuk jaringan komunikasi melalui kelompok paguyuban kelas.

Disisi lain setiap ada rapat wali murid di sekolah, kami memberikan kesempatan sesi usulan dari masyarakat yang ingin memberikan usulannya

¹⁵⁴ Dwiningrum, Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, 61-62.

terkait perkembangan mutu pendidikan yang ada di madrasah kami meliputi proses belajar mengajar, perkembangan tingkah laku siswa, perkembangan sarana prasarana, perkembangan hasil nilai ujian dari para siswa. Hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan yang dihasilkan oleh madrasah dalam pelaksanaan mutu pendidikan

Peran yang dilakukan madrasah pada intinya sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dukungan yang dilakukan pihak madrasah memberikan bantuan berupa material hal ini sesuai dengan teori yang dicanangkan pemerintah yang mengarah pada peran sebagai pelaksanaan yaitu masyarakat memberikan perannya terhadap sekolah dan mendukung untuk peningkatan ilmu dan pemerataan pendidikan, dalam sumber lain peran masyarakat sebagai pelaksanaan ialah adanya dukungan yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan

Disamping itu wujud peran masyarakat dalam wadah komite juga sesuai dibidang pengambilan keputusan yaitu masyarakat sebagai pengambilan keputusan yang rasional, persuasif dan melaksanakan perundingan dari tiap masalah. Pelaksanaan peran masyarakat dalam mutu pendidikan yang dilakukan di madrasah sebelum dimulainya kerja bakti masyarakat mengadakan rundingan antara pihak madrasah dan masyarakat dengan maksud selama pengerjaan dapat terhindar dari kesalahan.

Peran masyarakat sebagai wadah komite sekolah dibidang pengambilan manfaat juga tampak dari segi kualitas adalah hasil lulusan

yang meningkat dari tahun ke tahun dan dari segi kuantitas ialah bertambahnya jumlah prosentasi program yang terlaksana.

Peran masyarakat dalam wadah komite sekolah bidang evaluasi juga dilakukan di madrasah ini yaitu komite memberikan pengawasan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program. Pendekatan yang dilakukan di madrasah dalam pengerjaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan sosial dan juga pendekatan keikhlasan dimana masyarakat dalam kegiatan tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan. Keikhlasan yang dilakukan dan dibiasakan di lembaga ini sebagai wujud peran masyarakat yang luar biasa karena diketahui wujud peran masyarakat di luar madrasah masih banyak ditemukan adanya aktifitas masyarakat harus memberikan imbalan sedangkan di madrasah tersebut semua dilakukan dengan ikhlas.

Peran masyarakat melalui komite sekolah harus diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah yang mencakup.

- 1) Komite sekolah merupakan patner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah.
- 2) Pengembangan perencanaan strategik sekolah dengan perumusan program-program prioritas sekolah.
- 3) Pengembangan perencanaan tahunan sekolah
- 4) Melakukan monitoring internal dan evaluasi diri secara regular serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah.

- 5) Menyusun laporan tahunan sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah.
- 6) Melakukan review sekolah
- 7) Melakukan survey pendapatan sekolah terhadap stakeholder sekolah.
- 8) Memantau kinerja sekolah yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler

Peran masyarakat yang berjalan di madrasah ini dalam penciptaan budaya kelembagaan sebagian sudah dilakukan namun ada juga yang belum dilakukan. Peran komite dalam memajukan madrasah secara bersama-sama sudah dilakukan seperti adanya gotong-royong, memberikan bahan material, memberikan pertimbangan. Adapun mengenai pengembangan rencana tahunan sekolah belum bisa berjalan dengan baik karena berdasarkan data yang didapatkan peneliti rencana tahunan sekolah dibuat murni dari madrasah tanpa melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Agar terwujud rencana madrasah yang baik diperlukannya diskusi dan musyawarah dengan melibatkan masyarakat agar masyarakat mengetahui rencana yang akan dilakukan madrasah.

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bawasannya peran masyarakat dalam wadah komite sekolah dalam mutu pendidikan adalah peran yang dilakukan madrasah pada intinya sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dukungan yang dilakukan masyarakat kepada

madrasah memberikan bantuan berupa bahan material, hal ini sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah yang mengarah pada peran sebagai pendukung yaitu masyarakat memberikan peran dan perannya terhadap sekolah dan mendukung untuk peningkatan ilmu dan pemerataan pendidikan. Dalam sumber lain peran masyarakat sebagai pendukung ialah adanya dukungan yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian wujud peran masyarakat dalam wadah komite juga sesuai dibidang pertimbangan yaitu masyarakat sebagai pengambilan keputusan yang rasional, persuasif dan melaksanakan perundingan dari tiap masalah. Peran masyarakat sebagai wadah komite sekolah dibidang pengawasan juga tampak pada bentuk pengawasan komite sekolah yang terus ikut mengawasi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Peran masyarakat dalam wadah komite sekolah bidang mediator juga dilakukan di madrasah ini yaitu komite berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

B. Analisa Data tentang Peran Masyarakat Sebagai Wadah Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian

peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator (links) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.¹⁵⁵

Dari paparan di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan adapun fungsinya memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) kriteria kinerja dalam bidang kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan
2. Pendukung adapun fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berperan dalam pendidikan.
3. Pengontrol fungsinya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluarga pendidikan
4. Mediator fungsinya melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,

¹⁵⁵ Fatah Syukur NC, Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 88.

menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Keberhasilan madrasah tidak akan bisa terwujud tanpa adanya peran dari dewan pendidikan. Dewan pendidikan dalam memajukan madrasah dapat dilakukan dengan berbagai hal diantaranya adanya dukungan bantuan berupa buku pelajaran, bantuan ruang gedung ruang kelas dan bantuan alat pembelajaran lainnya untuk memajukan kualitas sarana prasarana.

Dewan pendidikan yang ada di lembaga madrasah ibtidaiyah juga memiliki tugas mengawal bantuan berupa dana dari pemerintah daerah agar bisa tersalurkan secara menyeluruh langsung kepada lembaga. Karena dalam pemberian bantuan berupa dana untuk rehabilitasi gedung, pembangunan gedung, pembangunan ruang kelas, pembangunan perpustakaan semua itu bersifat bantuan yang bentuk pencairannya tidak menyeluruh dengan jumlah total yang ditetapkan, maka dewan pendidikan di lembaga madrasah ibtidaiyah tersebut yang harus bertanggung jawab mengawalinya

Dalam hal pemberian dukungan bantuan yang diberikan dari dewan pendidikan kepada madrasah, masyarakat sudah memberikan perannya untuk memajukan pendidikan dalam hal sebagai pendukung yaitu memberikan bantuan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan. Peran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada madrasah harus dilakukan secara tertib agar masyarakat juga mengerti akan pentingnya bentuk peran masyarakat bagi madrasah.

Peran dewan pendidikan disamping sebagai pendukung juga tampak sebagai mediator yang mana peran mediator di lembaga tersebut ada saat masyarakat memberikan pengawasannya kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD kabupaten tentang pencairan dana yang akan diberikan madrasah. Dalam pencairan dana perlu adanya pengawasan yang ketat agar dana dapat tersalurkan secara total dan transparan.

Peran dewan pendidikan selanjutnya mempunyai fungsi sebagai pertimbangan adalah saat masyarakat membentuk paguyuban wali murid. Fungsi paguyuban wali murid itu adalah untuk merumuskan program, rencana serta memberikan usulan pendapat untuk kemajuan madrasah. Kelompok paguyuban yang dibentuk oleh madrasah mempunyai peran untuk membantu komite sekolah dan dewan pendidikan dalam mengadakan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Peran masyarakat sebagai dewan pertimbangan, masyarakat memberikan pendapat atau usulan secara positif dan mendukung bagi kemajuan pembelajaran.

Peran dewan pendidikan sebagai pengontrol di lembaga tersebut tampak saat dewan pendidikan memberikan pengawasan dan mengevaluasi program yang telah dilakukan seperti dalam rapat atau pelaksanaan program madrasah. Peran dewan pendidikan sebagai pengontrol di lembaga madrasah layaknya perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan kemudian dilakukan secara bersama agar program bisa berjalan dengan baik.

Peran masyarakat merupakan bentuk kerja sama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Peran tersebut antara lain berupa

bentuk administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kegiatan administrasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Administrasi pendidikan meliputi administrasi siswa, administrasi personal, administrasi tata usaha, administrasi sarana prasarana, administrasi kurikulum, administrasi keuangan, dan pembiayaan pendidikan, serta supervisi pendidikan.¹⁵⁶

Dalam fungsinya dewan pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan khususnya guru dan kepala satuan pendidikan dan kriteria fasilitas pendidikan dan hal yang terkait dengan pendidikan.

Dewan pendidikan di madrasah mempunyai fungsi sebagai aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai keputusan pendidikan yang diajukan dari

¹⁵⁶ Suryosubroto, Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat, 68.

masyarakat. Hal tersebut dilakukan pada saat rapat komite sekolah dan juga dilakukan saat ada program pembangunan sarana prasarana.

Masyarakat sebagai lingkungan strategis memberi pengaruh signifikan terhadap model desain badan pendidikan, karena masyarakat bersifat dinamis maka desain organisasinya dirancang atau di desain untuk merespon sikap dinamis tersebut. Pilihan strategis yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam desain pendidikan antara lain adalah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan. Prinsip organisasi ini adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan sekolah secara lembaga mendukung program dan kegiatan sekolah, merespon keadaan dinamis lingkungan masyarakat berkaitan dengan sistem nilai yaitu pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, dan etnik. Sehingga manajemen sekolah dapat digerakkan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.¹⁵⁷

Peran masyarakat dalam pengembangan pendidikan perlu direvitalisasi dan direkonstruksi menjadi lebih bernuansa advokasi, mediasi, pemberdayaan, dan demokrasi. Anggota dewan pendidikan sekolah mempersilahkan para staf guna untuk mencari cara memperbaiki mutu pendidikan.¹⁵⁸ Peran dewan pendidikan adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial.¹⁵⁹ Kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah dilepaskan dari

¹⁵⁷ Syaiful Sagala, *Budaya dan Reiventing Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), 281.

¹⁵⁸ Jerome S., *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Perumusan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 106.

¹⁵⁹ Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 67.

masyarakat, terutama masyarakat disekitarnya. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Itu pula sebabnya mengapa masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga dan lembaga pendidikan diharapkan bekerja sama secara erat dengan masyarakat.¹⁶⁰

Aspirasi masyarakat dalam wadah dewan pendidikan di madrasah berusaha memberikan yang terbaik bagi madrasah. Hal itu dapat dilihat saat pelaksanaan rapat dewan pendidikan ataupun rapat paguyuban tampak terlihat saling menghargai, saling mendukung serta saling mengarahkan jika terdapat kesalahan saat pelaksanaan rapat. Pada pelaksanaan rapatpun dewan pendidikan juga bertanggung jawab atas perbedaan pendapat yang disampaikan dari berbagai usulan masyarakat demi terwujudnya kemajuan dan kelancaran dalam proses pendidikan

Dalam kerjasama yang dapat dilakukan antara masyarakat bersama-sama dengan lembaga pendidikan disekitarnya. Program-program yang dapat dilakukan seperti memajukan proses belajar mengajar, mengintegrasikan pendidikan formal, informal, dan layanan non formal, membantu memajukan pendidikan non formal, layanan kesejahteraan keluarga, layanan bimbingan dan konseling, kerjasama dalam mencari dana pendidikan, koperasi, kegiatan rekreasi bersama, kesenian bersama, olahraga, dan sebagainya.¹⁶¹

¹⁶⁰ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendidikan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 207-208.

¹⁶¹ *Ibid.*, 210.

Peran dewan pendidikan perlu dilakukan revitalisasi dan melakukan analisis untuk mencari cara-cara untuk memajukan dan memperbaiki mutu pendidikan. Dalam memperbaiki mutu pendidikan itu perlu adanya keterlibatan, dukungan dan kepedulian dari masyarakat.

Bentuk peran yang dapat dilakukan masyarakat adalah:

1. Peran dalam proses perencanaan atau pembuatan keputusan
2. Peran dalam pelaksanaan program
3. Peran dalam pembuatan hasil
4. Peran dalam mengevaluasi program¹⁶²

Sedangkan menurut Hoofsteede menganalisis proses pengambilan keputusan masyarakat meliputi tahap inisiasi dan legitimasi, dan eksekusi yaitu:

1. Peran inisiasi merupakan peran yang mengundang inisiatif dari anggota masyarakat mengenai suatu kegiatan untuk masyarakat.
2. Peran legitimasi merupakan peran dalam tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang kegiatan.
3. Peran eksekusi merupakan peran pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tahapan peran di atas, peran inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibandingkan peran legitimasi dan eksekusi. Posisi masyarakat tidak sekedar sebagai obyek pembangunan saja, tetapi masyarakat

¹⁶² Rohiat, Manajemen Sekolah, 75.

dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan¹⁶³

Pemberian dukungan bantuan yang diberikan dari dewan pendidikan kepada madrasah sudah menunjukkan peran masyarakat untuk memajukan pendidikan dalam hal sebagai pendukung yaitu memberikan bantuan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan. Peran dewan pendidikan disamping sebagai pendukung juga tampak sebagai mediator yang mana peran mediator di lembaga tersebut ada saat masyarakat memberikan pengawasannya kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD kabupaten tentang pencairan dana yang akan diberikan madrasah. Peran dewan pendidikan selanjutnya mempunyai fungsi sebagai pertimbangan adalah saat masyarakat membentuk paguyuban wali murid. Fungsi paguyuban wali murid itu adalah untuk merumuskan program, rencana serta memberikan usulan pendapat untuk kemajuan madrasah. Peran dewan pendidikan sebagai pengontrol di lembaga tersebut tampak saat dewan pendidikan adalah memberikan pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan seperti dalam rapat ataupun saat dilakukannya program madrasah.

¹⁶³ Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah, 76-77.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran masyarakat dalam wadah komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah:
 - a. Adanya dukungan masyarakat yang berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan, masyarakat diajak musyawarah dalam kegiatan-kegiatan madrasah.
 - b. Terwujudnya masyarakat yang berperan sebagai pelaksana, yaitu masyarakat bergotong-royong membantu membangun sarana prasarana gedung ruang kelas sesuai dengan kesepakatan awal sebelum pelaksanaan pengerjaan.
 - c. Adanya peran masyarakat sebagai pengambil manfaat, yaitu terwujudnya peningkatan jumlah kelulusan dan adanya peningkatan jumlah prosentase program yang terlaksana.
 - d. Terwujudnya peran masyarakat sebagai evaluasi adanya tahap evaluasi yang dilakukan atas keseluruhan program yang dilakukan.
2. Peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah:

- a. Terwujudnya dukungan bantuan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan.
- b. Terwujudnya masyarakat yang berperan sebagai mediator, yaitu masyarakat memberikan pengawasannya kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD kabupaten tentang pencairan dana yang akan diberikan madrasah.
- c. Terwujudnya peran masyarakat yang berperan sebagai pertimbangan, yaitu adanya musyawarah dalam membentuk paguyuban wali murid.
- d. Terwujudnya masyarakat yang berperan dibidang pengontrol, yaitu pemberian pengawasan dan evaluasi atas program yang telah dilakukan seperti dalam rapat atau saat pelaksanaan program madrasah.

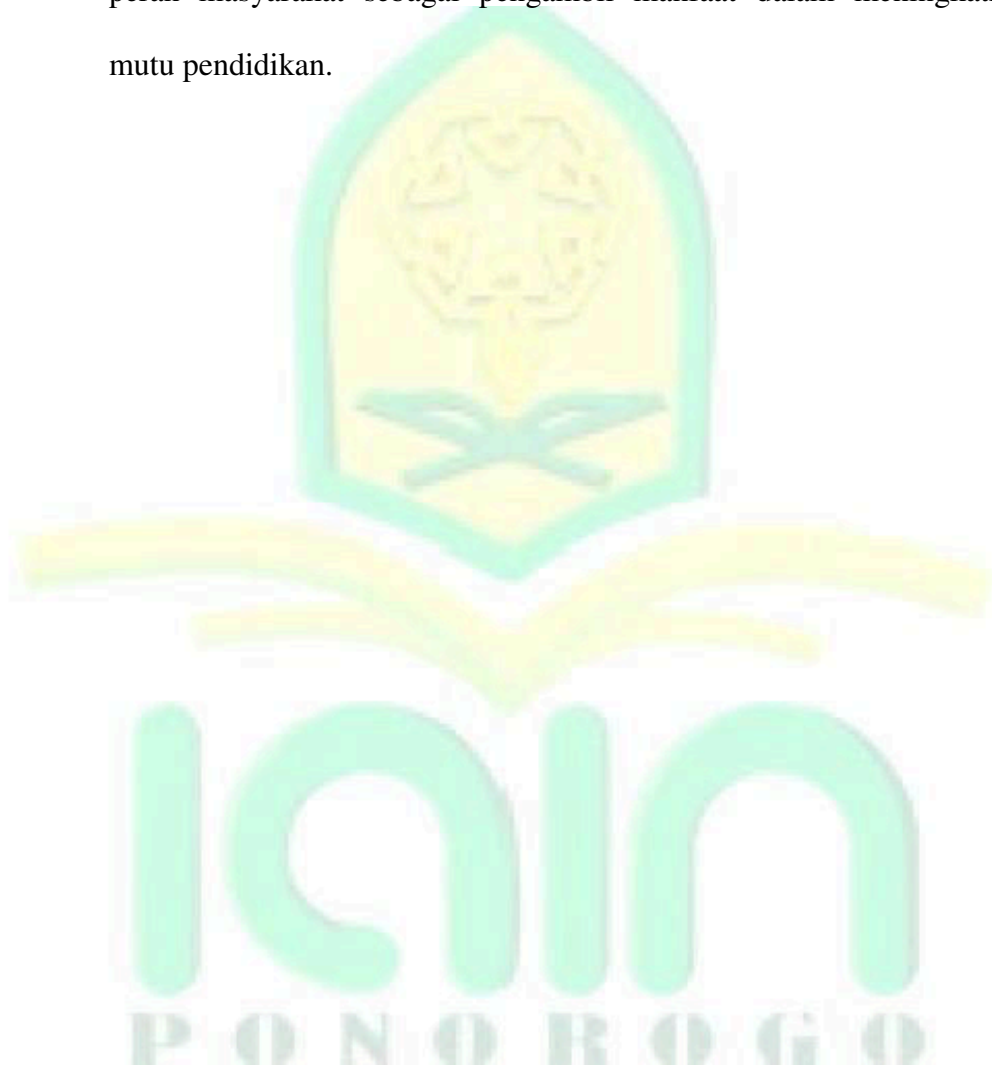
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu:

1. Bagi komite sekolah, diharapkan adanya peran masyarakat yang unggul dibidang pengambil manfaat, agar tercapainya jumlah lulusan mencapai 100%, yang mempunyai ketrampilan sehingga dapat berguna di masyarakat.
2. Bagi dewan pendidikan, diharapkan adanya peran masyarakat yang unggul dibidang pertimbangan, yaitu dengan menggunakan metode

yang tepat dalam pemberian kebijakan terkait program kerja yang dilaksanakan.

3. Bagi peneliti berikutnya, adanya judul penelitian yang membahas secara mendalam terkait peran masyarakat sebagai pertimbangan dan peran masyarakat sebagai penerima manfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Indonesiatara, 2003.
- Amtu Onosimus, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi*. Daerah Bandung: Alfabeta, 2011.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Astuti Dwiningrum Siti Irene, *Desentralisasi dan Aspirasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana Prasarana* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Daryanto, *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Administrasi Pendidikan, 2001.
- Dwiningrum , Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Aspirasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesioanal dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Gunawan Imam, *Teknik Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Hamalik Oemar, *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasbullah, J. *Sosial Kapital: Menuju keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press, 2006.
- Hasbulloh, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ife, J dan Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Imron, Ali, Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Irene, Siti, Desentralisasi dan Aspirasi Masyarakat dalam Pendidikan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Jamal Ma'ruf Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Yogyakarta: Diva Press, 2012
- Jerome S., Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Perumusan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kasan, Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan. Jakarta: Studia Press, 2009.
- Kompri, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kuswan. Wawan, School Based Managemen :Format Madrasah Masa Depan dan Masa Depan Madrasah. Bandung: Media Pembinaan, 2003.
- Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendidikan Sistem. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Maunah, Binti, Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012.
- Mulyasa E, Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasa H.E., Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Mulyasa, Dedi, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jogjakarta, Ar-ruzz Media, 2008.
- Narbuko Cholid, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Teknik Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2003.

- Prihantoro Rudy, Konsep Pengendalian Mutu. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Prihatin, Eka, Teori Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Robinson, Philip Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Rohiyat, Manajemen Sekolah Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Sagala, Syaiful, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sanaly Hajair, Pendidikan Islam Di Indonesia Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Sri Renani Pantjastuti, Komite Sekolah: Sejarah dan Prospek di Masa Depan. Yogyakarta,: Hikayat Pubishing, 2008.
- Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suparlan, Membangun Sekolah Efektif Yogyakarta, Hikayat Publisng, 2008.
- Supriyono, Agus, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suryosubroto. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Syaiful Sagala, Budaya dan Reiventing Organisasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syaodih Sukmadinata Nana, Teknik Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Umar, Husein. Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Tesis, Skripsi Dan Praktik Bisni. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Umberto Sihombing, Pendidikan Berbasis Masyarakat. Bandung: Remaja Roesdakarya, 2002.
- Usman, Husaini, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Zahro, Aminatul, Total Quality Management: Teori dan Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014.

Zazin, Nur, Gerakan Menata Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik. Jakarta: Predana Media Group, 2013.

